



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
KOMISI XI DPR RI DENGAN ASOSIASI EMITEN DAN ASOSIASI EFEK**

Tahun Sidang	2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: 2 (dua)
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 14 Januari 2020
W a k t u	: 14.00 s.d. 17.25 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat	: 1. Ir. Eriko Sutarduga B.P.S. (Wakil Ketua Komisi XI DPR RI); 2. H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Ketua Komisi XI DPR RI).
Acara	: Pembahasan Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan <i>Outlook 2020</i> .
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono : (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Hadir	: 1. KETUA UMUM ASOSIASI EMITEN INDONESIA (AEI) (FRANCISCUS WELIRANG) 2.KETUA UMUM ASOSIASI PERUSAHAAN EFEK INDONESIA (APEI) (OCTAVIANUS BUDIYANTO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S./WAKATUA KOMISI XI/F-PDIP):

Anggota Komisi XI yang saya hormati, begitu juga Ibu Bapak,

Kami mohon izin untuk memulai karena memang nanti pasti sekaligus datang rekan-rekan juga dari atas maklum Pak. Nanti kalau mau coba juga *lift*nya agak lambat Pak. Kami sudah mengajukan tapi belum pergantian. Ya jadi dimaklumi juga dan juga cukup ngantri juga untuk untuk turun.

Baik,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya, salam kebajikan

Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia beserta jajaran.

Yang terhormat Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau APEI beserta jajarannya.

Yang terhormat Anggota Komisi XI DPR RI dan hadirin seluruh yang berbahagia.

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat daftar hadir rapat telah ditandatangani.. jadi tadi sudah ditandatangani Pak yang rapat kami sebelumnya, total ada 27 dari 9 fraksi. Izin ada 11 orang. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, izinkanlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau APEI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Hadirin yang kami hormati, mengawali Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha kuasa karena berkat rahmat hidayah dan karuniaNya pada hari ini dapat menghadiri acara Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Ketua Umum AEI dan Ketua Umum APEI dengan keadaan sehat *wal 'afiat*. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI hari ini adalah mendengarkan paparan dari Ketua Umum AEI dan Ketua Umum APEI terkait dengan evaluasi situasi ekonomi tahun 2019 dan *outlook* tahun 2020.

Nah ini kenapa ini perlu, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Kami kan sebentar lagi juga akan menerima dari pemerintah yang disebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang Ibu Bapak juga sudah mendengar dan kenapa di kesempatan pertama ini kami mengundang APEI

dan AEI ini Ketua yang menyampaikan supaya kami semua Komisi XI baik Pimpinan maupun anggota mendapat masukan secara riil kondisi yang ada di dalam situasi saat ini.

Jadi nanti selain pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun nanti temen-temen juga akan berkembang untuk menanyakan dan juga memperdalam dan juga para Ketua Umum yang hadir di sini juga silakan atau nanti dari Ibu Bapak mau menambahkan untuk bisa kami mendapatkan informasi yang seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal kita ketahui bahwa AEI dan APEI merupakan organisasi nirlaba yang menjadi salah satu komponen penting dalam menggerakkan pasar modal. Bagi masyarakat modern, pasar modal ini menjadi alternatif mendapatkan keuntungan yang menarik baik dengan menjadi investor dengan membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal atau melakukan *go public* penjualan saham di perusahaan di pasar modal.

Dengan keberadaan AEI dan APEI akan memudahkan dalam mengimplementasikan sistem transaksi perdagangan terintegrasi mulai dari pemesanan, eksekusi transaksi, konfirmasi afirmasi, hingga *settlement* di Bursa Efek Indonesia, dan diyakini akan membuat industri pasar modal Indonesia berkembang lebih baik.

Selama beberapa tahun ini pemerintah sedang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Di tengah keterbatasan anggaran APBN, Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan setidaknya 7 pos alternatif pembiayaan infrastruktur. Salah satunya adalah pasar modal melalui kontak investasi kolektif, KIK, Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK, Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), dan obligasi daerah.

Saudara Ketua Umum AEI dan APEI, Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada penutupan perdagangan saham per 30 Desember 2019, IHSG pada level 6.229,53 atau 29,77 poin. Sedangkan pada pembukaan perdagangan saham per 2 Januari 2020, IHSG berada di level 6.313,12 atau ada kenaikan sejumlah 13,36 poin.

Perlu kita ketahui bersama bahwa di sepanjang di tahun 2019 sektor jasa keuangan yang didominasi oleh emiten perbankan telah membentuk lebih dari 40% kapitalisasi IHSG. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dalam kesempatan rapat dengar pendapat umum hari ini Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini pasar modal. Dan apa saja yang akan dilakukan oleh AEI dan APEI? Dalam menunjang perkembangan program percepatan ekonomi pemerintah pada tahun 2020.

Di samping itu Komisi XI DPR RI juga ingin mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi dan langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dalam menghadapi situasi perang global seperti saat ini. Ini bukan cuman ini saja Ibu Bapak, sekarang dengan panasnya hubungan antara Iran dan Amerika ini mungkin harga minyak akan menjadi bisa mencapai 100 dolar kalau Selat Hormus akan *problem*, ini juga perlu kita antisipasi. Nah ini juga salah satu yang penting juga Ibu Bapak berikan masukan juga kepada kami di sini.

Untuk menghemat waktu kami persilakan pada Ketua Umum AEI dan Ketua Umum APEI untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau.. silakan Ibu Bapak yang mengatur mana lebih dahulu apakah AEI? Barangkali AEI dulu ya di sini karena lebih hanya 3 huruf Pak. Jadi AEI dulu, baru APEI. Kan begitu ya Pak? Dan habis A ternyata E dulu baru P. Nah seperti itu, jadi rasanya baiknya kan begitu ya Pak ya. Nah silakan Ketua Umum AEI untuk dapat memberikan paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan.

KETUA ASOSIASI EMITEN (FRANCISCUS WELIRANG):

Terimakasih.

Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI beserta seluruh Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semuanya
Om swastiastu, salam kebajikan.

Pada kesempatan ini perkenalkan pertama kali kami memperkenalkan yang hadir bersama-sama kami. Di samping kami Pak Yan Parta adalah Sekjen kami. Samping kami satu lagi Pak Bobby Gafur, Wakil Ketua. Di ujung Pak Syamsul Hidayat adalah Direktur Eksekutif kami. Di belakang Pak Budiarsa, Wakil Ketua kami dan di sampingnya Pak Gunawan Cokro adalah penasihat ahli kami.

Baik, di dalam hal ini kami coba menjelaskan sesuai mungkin materi sudah diberikan. Ya jadi sesuai dengan pertanyaan dan arahan yang dibawakan yang kami dapat. Asosiasi Emiten Indonesia didirikan pada tanggal 13 Desember tahun 2018, 1988. Artinya kami sudah 31 tahun. Tujuan bertujuan untuk menjadi wadah satu-satunya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah *go public*. Jadi kami satu-satunya ya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah *go publik* untuk saling berbagi pengalaman dan juga untuk meningkatkan komunikasi terutama di antara perusahaan publik dan menjadi media terkomunikasi. Perusahaan publik kepada semua institusi dan kami memiliki visi mengembangkan pasar modal agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi pilar perekonomian nasional dalam mewujudkan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian mencapai kesejahteraan masyarakat. Misi kami sebetulnya adalah pengembangan peran Asosiasi Emiten Indonesia sendiri sebagai mitra pemerintah agar tercapai optimalisasi dalam pasar modal. Intinya adalah itu.

Dan tentunya di dalam hal ini kepada pertanyaan kedua secara struktur kelembagaan kami ini *platform* kami adalah pasar modal Indonesia kami tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Di dalam hal ini dalam pandangan kami ya walaupun Undang-Undang ini sampai saat ini masih cukup relevan, namun perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi di beberapa area. Jadi ini mengikuti era atau perkembangan ya seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan

masyarakat tentunya. Saya kira itu kuncinya di dua Undang-Undang ini perlu menjadi perhatian.

Selanjutnya keberadaan OJK sampai saat ini sudah cukup membantu dari segi pengawasan dan pengaturan di pasar modal. Walaupun tentunya terhadap *governance* ya jadi anggota-anggota kami sudah diatur tata cara mainnya meskipun banyak perlu ditingkatkan e dari sisi pengawasan maupun peraturan lagi dan untuk menjaga independensi. Yang sangat penting di sini menjaga independensi OJK. Menurut kami akan lebih baik jika OJK didanai oleh APBN bukan dari sektor industri. Hari ini didanai dari sektor Industri. Jadi itu mungkin yang dapat kami sampaikan.

Di pertanyaan ke 4 mungkin jadi berapa Anggota AEI tahun 2019 dan target dan ada permintaan Menteri Keuangan 1.000 emiten. Per bulan Desember 2019 jumlah anggota Asosiasi Emiten Anggota kami ini adalah 521 emiten atau sekitar hampir 80% dari total seluruh perusahaan efek yang tercatat di bursa. Target kami di tahun 2020 adalah mengajak 20% sisa emiten yang belum terdaftar sebagai anggota. Kami ini terbagi atas *property* dan *real estate* 11%, aneka industri 8%, industri barang konsumsi 8%, industri dasar dan kimia 13%, infrastruktur utilitas dan transportasi 10%, keuangan 17%, perdagangan dan jasa investasi 22%, pertambangan 7%, pertanian 4%, *property* dan *real estate* tadi sudah 11%. Saya kira itu.

Pencapaian yang sudah dilakukan oleh AEI di tahun 2011. Satu, bidang pendidikan, mengadakan *workshop*, seminar, *training*, sosialisasi, terkait kebijakan, peraturan, dan pelatihan untuk meningkatkan *soft skill* yang dibutuhkan oleh emiten.

Di bidang komunikasi kami menerbitkan khusus majalah *Listed Indonesia* membuat *web website* AEI, dan bekerjasama dengan emiten dalam peluncuran *platform* edukasi *e-learning*. Bidang pelayanan anggota mengadakan kegiatan advokasi, konsultasi, *charity*, dan *gathering* untuk emiten, melakukan survey kepada anggota terkait permasalahan yang dihadapi pada tiap sektor, dan mengadakan kerjasama dengan SRO dan pemerintah untuk menyampaikan masukan dan aspirasi anggota dalam penyusunan kebijakan peraturan.

Saya kira kami melampirkan gambar-gambar aktivitas kami. *Highlight* dari program tahun 20 sangat singkat saja kami men.. akan mengadakan Pendidikan untuk dewan direksi, dewan komisaris, dan *committee* audit dari emiten yang baru *go public*, yang baru *go public*.

Dua, melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah, SRO, maupun *stakeholder* terkait meningkatkan kepatuhan dan wawasan emiten mengenai pasar modal.

Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan *stakeholder* terkait mempertemukan Anggota AEI dan investor dengan tujuan meningkatkan *rating* Indonesia.

Kontribusi pajak dari Anggota AEI, dalam penerimaan pajak pemerintah khusus kontribusi pajak emiten adalah 158,5 dalam catatan kami 158, 5 triliun di tahun 2018. Pertumbuhan pada kontribusi PPH badan, dari emiten selalu mengalami peningkatan di tiap tahun, yaitu mencapai angka antara 10%-15% dari tahun sebelumnya. Jadi ini *tracking* yang ada pada kami yang kami ikuti.

Masalah apa yang menjadi hambatan perkembangan pasar modal hari ini? Yang kami lihat masih belum banyak jumlah perusahaan yang *go public*. Masih terbatas di kita, nanti.. masih kurangnya jumlah investor lokal walau

pertumbuhannya sudah cukup signifikan. Perlu peningkatan promosi pasar modal Indonesia kepada investor asing. Jadi masih aktivitas ini harus ditingkatkan. Peningkatan produk-produk pasar modal masih bisa ditingkatkan. Jadi ini tentunya perlu tantangan dan perlunya peningkatan kegiatan pasar modal Syariah, dana syariah ini juga cukup besar. Saya kira itu di dalam hal itu.

Dalam meningkatkan *performance* AEI dari segi regulasi. Perlu evaluasi perlu evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 sudah terlalu lama, saya kira itu. AEI meminta untuk lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan penyusunan peraturan dan dijalankan secara konsekuen. Itu sebetulnya yang ingin kita harapkan. Dan AEI berharap anggota AEI bisa mendapat keleluasaan terkait peraturan atau lebih diberikan prioritas di dalam hal itu, mengingat anggota kami adalah perusahaan terbuka yang mendapatkan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. Jadi di dalam hal ini.. kami memberikan contoh Ditjen pajak dapat mengecek pelaporan pajak perusahaan terbuka melalui auditor yang terdaftar di OJK. Kadang-kadang anggota kami diperiksa pajaknya oleh 2 periode yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi ujung-ujungnya slbuk melayani pemeriksaan pajak. Saya kira itu.

Dan yang ke-10 itu prinsipnya AEI akan selalu aktif untuk mendorong anggota kami meningkatkan *compliances*. Jadi *compliances* masing-masing perusahaan sehingga dapat mendorong peningkatan rating Indonesia, dan ini karena ini sangat penting untuk penarikan investor.

Selanjutnya, situasi ekonomi *outlook* tahun 2019 merupakan tahun politik, sehingga pertumbuhan ekonomi mungkin tidak terlalu signifikan yaitu terjaga di angka 5%. Di tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat rata-rata 5,3%. Namun hal ini perlu dukungan, perlu dukungan dan implementasi peraturan yang baik dari pemerintah. Apabila Omnibus law dapat diterapkan, ya kami lihat diterapkan dan dijalankan dengan baik, kami yakin secara positif proyeksi pertumbuhan yang ditargetkan bisa dicapai. Jadi Omnibus law ini memang merupakan hal yang kami sangat perhatikan dan ini menyangkut tumpang tindih Undang-Undang dan tumpang tindih peraturan antar Kementerian juga. Saya kira ini hal yang banyak di alami oleh anggota kami.

Saya kira demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih Pak Franky, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia. Silakan berikutnya dari Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, waktu dan tempat kami persilakan.

KOMITE KETUA UMUM APEI (OCTAVIANUS BUDIYANTO/OKI):

Baik.

Selamat sore Bapak-Bapak sekalian, khususnya Pak Dito dan Pak Eriko dan beserta jajaran dari Komisi XI, Anggota DPR RI.

Jadi perkenankan sesuai dengan surat dari DPR RI kepada kami Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, kami memenuhi undangan itu dan kami mencoba untuk menjawab dan nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih dalam tentang pasar modal di Indonesia.

Nah bersama ini APEI ini begini Pak, agak unik karena kami ini memiliki Ketua yang kami sebut adalah KKU Pak, Komite Ketua Umum. Jadi setiap satu periode ini kami diangkat Ketua Umumnya ada lima Pak dan secara bergantian nanti ada satu koordinator dalam satu periode tertentu itu. Ya kebetulan tahun ini saya menjabat Pak. Nah Bersama ini Ketua KKU tadi ada 5, saya sendiri Oktavianus Budianto dan Karman Dwiharjo sebelah kami, dan di sebelah paling kanan Pak Rudi Utomo, di sebelah beliau Pak Zaki Mubarak, dan di sebelahnya lagi seorang Ibu, Bu Trini.

Karena kami ini organisasi yang masing-masing juga kami bekerja di perusahaan efek Pak, jadi untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari kami dibantu oleh seorang Direktur Eksekutif yaitu Bu Lili Wijaya. Bu Lili Wijaya ini di dedengkot Pasar Modal juga Pak, gitu ya.

Nah berikutnya lagi teman kami yang di belakang ada Pak Hari Mantoro. Dia senior juga memegang sebagai bendahara dan Sekjen kami Pak John Tambunan dan berikutnya lagi, Pak Heru Pak dari Mandiri sekuritas Pak.

Oke Baik Pak jadi kalau tadi kami sifatnya kolektif kolegal, maka kami berusaha untuk menjawab juga secara bersama-sama kita memutuskan kami bertiga untuk menjawab pertanyaan dari Bapak itu. Silahkan Bu Lili sebagai kesempatan pertama.

DIREKTUR EKSEKUTIF APEI (LILI WIJAYA):

Terima kasih Pak Oki panggilannya. Pak Oktavianus Budianto tapi panggilannya Pak Oki. Terima kasih Pak Oki.

Saya mencoba menjawab pertanyaan Nomor 1 mengenai sejarah terbentuknya APEI ya berikut visi misi sesuai dengan daftar pertanyaan. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia didirikan pada tanggal 11 juli 1995 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi sekarang tahun ini sudah masuk usia ke-25, masih kalah dengan AEI. APEI berfungsi sebagai wadah tunggal dan perwakilan resmi untuk industri sekuritas yang menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi resmi demi membangun industri sekuritas yang sehat dan tangguh dalam rangka mengembangkan pasar modal Indonesia. Itu fungsi APEI.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek, wajib menjadi anggota asosiasi yang mewadahi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang mendapatkan pengakuan dari OJK.

Jadi atas dasar itu sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran OJK Nomor sekian-sekian Tahun 2017 tentang pengakuan terhadap asosiasi perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, APEI telah memperoleh Pengakuan dari OJK, ya sebagai asosiasi yang dimaksud. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 58 Tanggal 21 November 2017. Jadi belum lama ini.

APEI berkedudukan di Jakarta. Pada saat ini APEI berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, *Ground floor*.

Visi APEI mewujudkan APEI sebagai lembaga yang berintegritas dan berdaya bagi anggota. APEI ini sekarang masih wadah tunggal dari seluruh perusahaan efek di Indonesia. Misi APEI adalah menciptakan dan meningkatkan kapasitas asosiasi ...(rekaman terputus)... Komite Ketua Umum periode 2017 sampai 2020 yang sekarang yaitu peningkatan pemberdayaan anggota, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan regulasi, kemudian pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi. Jadi dengan peningkatan kapasitas organisasi, diharapkan memang APEI lebih dapat melayani anggotanya dan juga menjadi katakanlah partner dari regulator karena tugas kami mayoritas juga mengenai *rule making rule* ya memberikan masukan dan sebagainya kepada regulator. Jadi kita harapkan APEI dapat melakukan fungsinya yang demikian.

Kemudian yang Nomor 2, mohon dijelaskan apakah Undang-Undang yang berlaku sudah sesuai dengan perkembangan pasar modal saat ini, mengingat sistem digital digitalisasi yang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini. Nah Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 sudah berusia 25 tahun, bagi kami memang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan pasar modal, khususnya mengingat era digitalisasi itu. Hal-hal yang sudah harus disesuaikan misalnya tentang KYC dan pembukaan rekening ya. Bagaimana itu bisa lebih disimplifikasi, tapi tetap aman, tidak katakana tetap memperhatikan resiko dan sebagainya.

Kemudian sistem perdagangan, penyelesaian, dan pelaporan. Bagaimana ini semua dapat memanfaatkan digitalisasi dan perkembangan digital sekarang bagaimanakah kita mengambil keuntungan manfaat dari situ. Kemudian juga IPO tadi dari AEI juga ingin punya target ya emiten 1.000 dan sebagainya. Bagaimana Peraturan OJK diselaraskan sehingga juga memudahkan emiten ya calon emiten untuk *go public*. Juga sistem pengawasan kita juga berharap bisa lebih karena ada ini kan digital ya. Katakanlah ya era digital itu ada *big data* dan sebagainya itu harusnya sangat memudahkan. Jadi itu juga di sistem pengawasan juga kami harapkan bisa ditingkatkan, ya betul ya. Saya pikir itu 2 sesuai penugasan kepada saya. Kembali ke Pak Oki.

KETUA KKU APEI (OKTAVIANUS BUDIANTO/OKI):

Baik.

Bapak-Bapak Ibu sekalian,

Saya coba Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ketiga mohon dijelaskan apakah keberadaan OJK sudah cukup membantu dalam segi pengawasan dan pengaturan di pasar modal?

Pengawasan dan pengaturan di pasar modal hendaknya sinkron dengan pengawasan dan pengaturan industri perbankan dan industri keuangan non bank lainnya. Saat ini masih ada, ini kesan kami Pak, jadi rasanya ada *shallow* antar industri keuangan dalam organisasi OJK. Padahal nilai jual dari pembentukan OJK adalah semua industri keuangan ada di bawah satu atap dan merupakan standar atau *repayment* yang sama, sehingga memudahkan koordinasi antar industri khususnya terkait pengawasan. Misalnya antar produk *cross industry* dan pengaturan misalnya regulasi juga antar industri. Ini yang kami menganggap saat ini masih masih belum belum terintegrasi.

SDM OJK diharapkan bisa lebih *market oriented* dan memiliki *commercial mindset*. OJK hendaknya proaktif terhadap perkembangan pasar yang sangat dinamis dan cepat dengan tanggap membuat peraturan yang pro bisnis, namun tetap memperhatikan tata kelola dan *risk management* yang baik. Seperti tadi Bu Lili tekankan bahwa sekarang perubahan teknologi itu butuh cepat Pak. Jadi ini yang sekarang kadang-kadang kita ketinggalan kalau boleh saya sebut, mohon izin mungkin teman-teman di *finctech* itu dari sisi regulasi dan lain-lain itu lebih lebih cepat dari sesi pembukaan rekening dan lain-lain, KYC dan lain-lain. Jadi ini yang kami merasa kami lalu terlalu *rigid* pengaturannya Pak karena belum belum belum dimungkinkan untuk melakukan transaksi yang yang lebih modern dibandingkan transaksi yang tradisional.

Nomor 4 mohon berikan data berapa banyak anggota APEI sampai dengan tahun 2019 dan target 2020?

Ini agak berbeda mungkin karena anggota kami hanya perusahaan efek, jadi kami juga tidak punya target untuk tahun ke depannya, tapi pada saat ini jumlah anggota APEI per 31 desember 2019 tercatat 116 perusahaan efek Pak. Yang terdiri dari 106 anggota bursa dan 10 non-anggota bursa. Jadi ini catatan dari kami.

Pertanyaan Nomor 5, mohon untuk diuraikan dan dijelaskan pencapaian yang sudah dilakukan oleh APEI di tahun 2019 dalam meningkatkan pasar modal Indonesia sebagai indikator pasar modal.

Nah, APEI berfungsi sebagai partner dan mitra regulator khususnya dalam proses *rule making rule*. APEI juga memberikan masukan kepada regulator, atas kebutuhan merevisi peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pasar atau membuat peraturan baru untuk merespon perkembangan pasar. APEI juga aktif menangani permasalahan anggota misalnya terkait perpajakan perusahaan efek. Dari waktu ke waktu APEI membantu anggota memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan pendapatan dan juga untuk.. sehingga terhindar dari *predatory pricing* yang merugikan anggota dan industri dan penurunan biaya. Misalnya kami juga selalu negosiasi dengan OJK tentang pungutan-pungutan OJK dan ada beberapa iuran lain yang dibebankan kepada kami Pak. Jadi Kami selalu meminta regulator untuk *concern* terhadap misalnya sekarang ekonomi lagi lesu, transaksi lagi lesu, tapi kalau di iuran itu kan mereka OJK tu hanya lihat *revenue* Pak, *no matter* itu rugi apa nggak, pokoknya *revenue*-nya berapa mereka akan pungut itu Pak. Ini yang kita selalu negosiasikan kepada OJK.

Nah tentang *rule making rule* tadi, jadi setiap peraturan yang dikeluarkan OJK itu biasanya akan di-*review* oleh asosiasi dulu Pak, sebelum di *launch* atau di sosialisasikan kepada member. Jadi kami sering intens dengan OJK juga

akhir-akhir ini untuk membentuk semacam *working group* atau *forum group discussion* sebelum diluncurkan peraturan itu.

Aktivitas dalam proses *rule making rule* ini yang sudah kita lakukan di tahun 2019. Perizinan perusahaan efek daerah, simplifikasi pembukaan rekening efek dalam rekening dana, penyelesaian transaksi bursa, pelaksanaan penawaran awal penawaran pernyataan dan distribusi efek bersifat ekuitas, utang sukuk secara elektronik, sertifikasi kompetensi kerja, penerapan prinsip manajemen perusahaan efek, pedoman pemasaran dan penjualan reksadana. Aktivitas sebagai *partner* strategis OJK SRO dan lembaga pemerintah, APEI sebagai *partner* strategis OJK dalam *taks force* market standart transaksi revo atas efek sifat ekuitas, *taks force* keanggotaan APEI dalam perusahaan Efek dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). *Task Force* studi *master plan* perusahaan efek, Forum Komunikasi Koordinasi dan Kerjasama Sektor Jasa Keuangan (FKSJK). Tim perumus SKKNI bagi WPPE dan WPP. Jadi ke depan pak ini poin terakhir tadi setiap izin nanti oleh yang dikeluarkan oleh regulator itu harus memenuhi standar standarisasi oleh SKKNI. Jadi nanti kami terlibat juga dengan dengan pihak badan standarisasi profesi. Jadi semua profesi nanti akan distandarisasi BNSP Pak. Jadi Badan Nasional Standar Profesi, kami kerjasama dengan mereka untuk standarisasi semua izin-izin yang ada di lingkungan pasar modal. Ini merupakan hal yang baru juga.

APEI sebagai *partner* strategis SRO, *working group* (suara tidak jelas) pada intinya adalah ini untuk mempermudah atau lebih mengefisienkan *settlement* di transaksi efek, tim kerja fitur PT S-Invest, (..) IPO saham dan obligasi, komite pengarah teknologi informasi manajemen risiko Bursa Efek Indonesia, *working Group* proyek KYC *administration*.

Aktivitas dalam solusi permasalahan anggota antara lain, penerapan ketentuan mengenai kegiatan utama perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek terhadap penjamin emisi *joint venture* yang tidak melakukan lokal *underwriting*. Jadi ini banyak teman-teman dari perusahaan asing yang mereka merasa menjadi beban pada saat diwajibkan untuk menjadi *underwriter* untuk emiten-emiten di local Pak.

Perpajakan perusahaan efek terkait alokasi biaya bersama dan PPN atas biaya transaksi bursa Levi ini kami juga selalu berdialog dengan OJK dan pajak Pak untuk masalah hal ini. Kewajiban iuran tahunan IPP dana perlindungan pemodal usulan penetapan waktu terkait statement IPO.

Aktivitas dalam bidang pendidikan dan pelatihan antara lain, penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan direksi dan komisaris perusahaan efek. Jadi kami mewajibkan Pak berdasarkan surat dari mandatory OJK tadi, kami sebagai asosiasi mewajibkan untuk secara berkala memberikan pelatihan dan pendidikan kepada semua direksi dan komisaris daripada perusahaan efek Pak. Nah karena ada beberapa juga yang direksi maupun apa komisarisnya juga ada di luar negeri, kami juga sampai menyelenggarakan secara *online* juga untuk pendidikan ini. Yang yang lainnya adalah penyelenggaraan literasi dan inklusi keuangan, pendiri Yayasan Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia LSPPMI, ini yang tadi kami sebutkan terdahulu.

Aktivitas dalam kerjasama internasional antara lain, kami 2 tahun lalu 2018 menjadi tuan rumah ASF Pak, Asia Securities Forum. Jadi merupakan satu kebanggaan juga buat kami di Indonesia pada waktu itu menjadi tuan rumah untuk forum Asia Securities Forum. Asia Securities Forum ini adalah

semua perusahaan atau institusi di pasar modal di negara-negara Asia Pak. Jadi ini kami setiap tahun selalu berkumpul dan tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah di situ. Partisipasi dalam ASF 2019 di Istanbul. Jadi yang terakhir tahun lalu itu mereka menyelenggarakan di Istanbul Turki. Selain itu setiap tahun kami juga ikut berpartisipasi aktif dalam Tokyo Round Table di Tokyo Jepang. Jadi ini acara tahunan yang dilakukan oleh JSDA, yaitu *Japan security dealers Association* mereka memberikan sponsor kepada semua negara-negara di asia, termasuk Indonesia dan kami diberi undangan dan diberi jatah 1 orang untuk selalu mengikuti pelatihan-pelatihan di Jepang, dan ini menurut kami sangat sangat sangat efektif dan terjadi *transfer knowledge* dari negara-negara tetangga kepada Indonesia khususnya.

Aktivitas dalam bidang penelitian dan kajian ilmiah antara lain, market standart repo atas efek bersifat ekuitas yang mengacu pada *Global Master Repurchase Agreement (GMRA)* Indonesia dan *best practice* di pasar internasional, dan serta diselaraskan dalam pasar repo Indonesia. GMRA Indonesia sebagai dokumen perjanjian transaksi repo yang wajib digunakan oleh lembaga Jasa Keuangan di Indonesia. *Market standard repo* ini telah diluncurkan pada tanggal 21 mei 2019, *taks force study master plan* perusahaan efek dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek ini sedang berjalan Pak. Jadi dari tahun 2019, cuman ini masih terus. Jadi intinya adalah kita mau mengarah ke mana di masa yang akan datang dengan segala perubahan teknologi dan lain-lain. Jadi termasuk juga kami menyadari bahwa kalau kita suka bercanda sama temen-temen ini adalah bisnis inefisiensi yang diproteksi pak gitu ya karena kalau kita bandingkan sama teman-teman di *fintech* di *marketplace* jauh sekali pak *costnya*, mereka tidak perlu orang lagi dan semua dilakukan dengan robot tapi yang kita jual adalah ini masalah *security*. Bagaimana kita bisa meyakinkan pada investor bahwa *security* ini aman dan bisa *settle* dengan baik itu mungkin pak.

Mungkin itu dari saya, Mungkin dilanjutkan oleh pak Karman untuk poin berikutnya silakan pak.

KKU APEI (KARMAN PRAMURAHARJO):

Baik terima kasih saya coba lanjutkan ke pertanyaan Nomor 6 ya.

KETUA RAPAT:

Maaf, siapa namanya Bapak?

KKU APEI (KARMAN PRAMURAHARJO):

Saya Karman Pak. (Pak Karman ya Pak ya) Karman Pramuraraharjo saya Pak (Ya terimakasih)

KETUA RAPAT:

Pak Karman Pramuraraharjo. Oh berarti dari Jawa loh Pak. Soalnya ada rekan kita Hendrawan Supratikno Pak. Jadi kurang lebih sama ya Pak ya.

KKU APEI (KARMAN PRAMURAHARJO):

Baik, saya lanjutkan ini nomor 6 ya, jadi nomor 6 mohon diberikan *highlight* program APEI di tahun 2020 untuk peningkatan pasar modal di Indonesia. Jadi kita mengetahui bahwa sebenarnya untuk memperbesar pasar kita ada beberapa aspek, beberapa area yang harus kita ini. Yang pertama adalah investornya sendiri, yang kedua adalah anggota kita *which is the (...)*nya, kemudian regulator yang akan menyeluruhi semua ini dan produknya *which is the emiten* ya. Jadi beberapa hal program yang sudah kita laksanakan misalnya untuk investor misal jadi kita melakukan literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat dan pemodal. Itu sudah kita lakukan dan akan kita tingkatkan terus ke depan. Karena *issue*-nya sebenarnya adalah untuk masyarakat umum adalah mereka sudah inklusi tapi belum literasi, nah problem seperti itu adalah bahaya karena mereka sudah masuk ke dalam investasi, tapi sebenarnya belum mengerti apa artinya investasi, berapa risikonya. Jadi kita selalu ke depan ingin meningkatkan hal-hal seperti itu.

Nah kemudian juga di dalamnya adalah termasuk peran para anggota kita misalnya jadi seminar untuk meningkatkan pengetahuan anggota, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman anggota atas peraturan-peraturan yang baru. Nah kemudian juga edukasi atau pendidikan berkelanjutan untuk *update* perkembangan yang terkini. Nah itu kita lakukan kepada para anggota kita.

Kemudian dalam sisi regulatornya seperti apa? Jadi kita ini bersama dengan regulator sebagai *partner* untuk *rule making rule* atas rancangan peraturan yang ada. Jadi kita berharap masukan-masukan dari kita yang sifatnya lebih dari industri *which is* lebih dari *commercial side* itu bisa didengarkan dan jadi bahan masukan bagi OJK dalam mengeluarkan peraturan.

Kemudian juga kita peran serta aktif dalam efisiensi biaya industri misalnya dalam pemangkasan biaya industri yang kita selalu kita komunikasikan kepada OJK, dan juga dalam peningkatan pendapatan anggota misalnya melalui produk-produk baru yang kita ingin bisa ada di pasar kita.

Kira-kira seperti itu program *highlight* untuk tahun 2020 tidak jauh berbeda dari 2019 tapi akan kita tingkatkan dari sisi intensitasnya.

Pertanyaan nomor 7 adalah mengenai mohon jelaskan berapa besar kontribusi pajak dari anggota APEI dalam penerimaan pajak pemerintah?

Nah ini ada beberapa aspek sebenarnya yang kita ingin bahas, tapi kurang lebih salah satunya adalah pajak atas transaksi jual. Jadi setiap kali jual beli saham di bursa saham itu seluruh penjual itu harus membayar 0,1 kali *turn over* transaksi jual yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah sebagai contoh besaran seperti apa? Jadi gini kira-kira 1 hari itu transaksi di Bursa Efek itu sekarang ini rata-rata 7 sampai 8 triliun. Nah 0,1 itu itu kurang lebih adalah 7 sampai 8 milyar per hari. Nah kalau kita kalikan itu dengan hari kerja sekitar 240 lah ya kurang lebih itu jatuh dengan hampir 2 triliun rupiah dalam 1 tahun. Nah itu hanya dari pajak atas transaksi jual 0,1.

Nah selain itu ada apa lagi? Jadi pada saat kita waktu perusahaan *go public* itu kan *founders holders* nya harus membayar 0,5% dari *market cap company* yang akan *listing*. Jadi kalau kita bilang bahwa *market cap* secara keseluruhan 1 tahun misalnya ada say 10 triliun, ya 0,5% dari 10 triliun itu yang

harus dibayar oleh *founders* atas pajak (suara tidak jelas) pada saat perusahaan *go public*.

Nah kemudian ada apalagi? Kita juga merupakan salah satu *broker* untuk jual beli saham eh obligasi. Nah obligasi itu ada pajak atas bunga obligasi. Nah kita memang tidak langsung di sana, tapi pajak obligasi itu dengan adanya transaksi likuiditas obligasi itu kita juga berperan dalam memberikan pajak obligasi, bunga obligasi. Kemudian pajak atas deviden ini sebenarnya bukan kita lebih ke arah AEI ya. Jadi tapi kita termasuk salah satu komponen yang ada di dalamnya.

(rekaman tidak jelas). Kita yang mau *go public* betul.

Nah selain itu juga ada pajak perusahaan efek yang memberikan kontribusi terhadap pungutan OJK, jadi kita sebagai perusahaan efek segala macam semua *income* perusahaan efek itu kita bayar kita memberikan kontribusi 1,2% kepada pendapatan OJK ya.

Kemudian *move* ke pertanyaan nomor 8, mohon dijelaskan masalah apa yang menjadi penghambat perkembangan pasar modal kita saat ini dan melihat situasi perang dagang yang sangat kuat setiap tahunnya dan solusi apa yang sudah dilakukan untuk mengatasinya?

Jadi, industri kita kalau kita lihat dengan perkembangan zaman ini memang banyak mengalami beberapa hambatan yang pertama adalah regulasi yang sangat ketat dan *rigid* yang dibandingkan dengan industri keuangan lainnya misalnya *fintech* yang sekarang boleh dibilang *head to head* sama kita. Ini terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi pendekatan standarisasi regulasi antara jenis industri keuangan tanpa memperhatikan perbedaan profil bisnis risiko dari masing-masing industri juga menjadi penghambat. Contohnya antara kita di dalam di dalam kita pasar modal itu kita ada pasar modal, ada perbankan dan ada juga IKNB *which is* nonkeuangan. Nah kita inginnya kalau memang di dalam 1 keuangan itu regulasi antar kita itu *seamless*, jadi itulah sebenarnya yang tadi kita katakan nilai jual dari OJK. Jadi kalau bisa di koordinasi diharmonisasi jadi ini jangan sampai ada perbedaan antara regulasi di kita sebagai pasar modal *broking* dengan di perbankan dalam hal menjual barang yang sama. Jadi perlakuannya berbeda. Nah ini yang kita ingin yang kita namakan sepenuhnya *on the same level playing field*. Nah itu kita berharap nanti dengan adanya Omnibus law ini bisa sebenarnya dijembatani ya. Contohnya salah satunya Juga misalnya pengaturan soal komite audit, internal audit penyimpanan dana dan efek yang cenderung disamakan dengan *deposit taking institution*, misalnya kayak perbankan dalam hal ini. Padahal *broker* itu atau kita nih ya asosiasi perusahaan efek ini sangat berbeda dengan bank atau asuransi yang mengelola dana publik ya.

Nah kemudian apalagi? Nah jadi salah satu hal mengapa pasar modal itu menarik adalah likuiditas yang ada, Jadi ini berbeda dengan misalnya kalau properti, properti likuiditasnya nggak seberapa, tapi kalau di dalam pasar modal likuiditas itu menjadi satu hal yang utama. Nah kita ingin regulasi yang ada di dalam pengembangan likuiditas swasta modal itu diselaraskan dengan kondisi saat ini, misalnya sebagai salah satu contoh misalnya asuransi dana pensiun itu agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan produk *lending and borrowing* sehingga pasar bisa lebih semarak dikarenakan likuiditas yang sangat terjaga. Jadi keadaan saat ini adalah dana pensiun itu tidak disertakan dalam *lending and borrowing*. Nah kadang-kadang pada saat orang perlu barang itu kita ingin ada orang yang bisa *supply* juga, nanti kita akan

menjembatani *of course* semua regulasinya kan kita ikutin dan kita akan menjaga *confidentiality* dan kehati-hatian dalam pengolahan barangnya, tapi kita ingin banyak pihak yang bisa kita jadikan sebagai *source* pinjaman dari *market ability securities* yang akan kita jual belikan.

Satu lagi hal yang juga ini adalah *human capital* dari OJK yang kita harapkan bisa lebih *market-oriented* dan memiliki *commercial mindset*. Jadi kita berharap agar lebih proaktif dalam perkembangan pasar yang sangat dinamis dan cepat dengan tanggap membuat peraturan yang lebih pro bisnis. Namun tetap memperhatikan tata kelola dan *risk management* yang baik. Nah kita juga ingin agar Bursa Efek bisa lebih kompetitif dan transparan dalam mengolah dan bertanggung jawab kepada *stakeholder* termasuk semua *shareholders* yang ada di dalamnya.

Jumlah investor, jumlah pilihan investasi buat investor saat ini masih memang kurang ya kita berharap sebenarnya agar Bapak bisa juga mempermudah izin agar BUMN bisa bergerak dalam proses IPO, karena untuk saat ini untuk BUMN *go IPO* memang prosesnya agak panjang. Jadi kalau kita lihat *source of company company* yang masuk ke ini lebih banyak memang lebih banyak *private company* sekarang.

Suku bunga yang masih sangat tinggi saat ini dan sebenarnya *mindset* masyarakat Indonesia yang hanya mengenal *saving product* dibandingkan dengan investor produk. Perlu pengenalan sejak dini yang dilakukan melalui kurikulum sekolah sejak dini agar sebenarnya investasi itu hanya bukan hanya *saving product* karena kalau kita lihat negara-negara di luar itu sebenarnya investasi itu bukan hanya produk deposito. Jadi alternatif di pasar modal ini merupakan salah satu alternatif lain yang bisa dipikirkan dan seyogyanya kalau misalnya ini diperkenalkan sejak pada saat dari kurikulum sejak dini, ini bisa membuat pasar kita lebih berkembang.

Kemudian Nomor 9, mohon dijelaskan upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan *performance* APEI dan AEI dari segi regulasi dan operasional. Jadi APEI sering berkoordinasi dengan regulator, tadi kita sudah lihat Pak Oki sudah gambarkan ya apa saja yang kita lakukan bersama dengan regulator dan memberikan masukan sesuai dengan aspirasi anggota kita. Yang tentunya diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja keuangan dari perusahaan efek anggota kita dalam dan perkembangan pasar modal Indonesia. Harapannya adalah regulator, semua regulator itu bisa merespon masukan APEI dengan positif.

Poin Nomor 10, sejauh mana peranan AEI dan APEI dalam meningkatkan peringkat Asean Corporate Governance Scorecard di tahun 2020?

APEI sebagai asosiasi perusahaan efek dalam hal ini memang tidak terlibat dalam inisiatif peringkat ACGS Indonesia mungkin AEI dalam hal ini mungkin lebih banyak terlibat.

Kemudian pertanyaan Nomor 11, bagaimanakah menurut AEI dan APEI terkait dengan evaluasi situasi ekonomi tahun 2019 dan Outlook situasi ekonomi tahun 2020?

Jadi secara keseluruhan kita bisa bilang *challenging* tapi kita tidak perlu berkecil hati ya, karena secara keseluruhan sebenarnya negara Indonesia kalau dilihat dari investor luar, kita bicara investor luar mereka sebenarnya cukup *update* dengan Indonesia, asal Indonesia bisa mengeksekusi *plan-plannya* dengan baik. Jadi pasar memperkirakan ekonomi Indonesia dapat

tumbuh 5% tahun 2020 ditopang dengan konsumsi rumah tangga investasi dan belanja pemerintah inflasi diperkirakan masih 3,5 persen yang berpotensi untuk memberikan ruang bagi penurunan suku bunga kita di Indonesia.

Nah beberapa *issue* yang memang suka ditanyakan ...(kaset terputus).. mengarah ke lebih besar. Kita mengetahui memang secara teori pada saat masyarakat ekonomi agak resesi memang *government* harus bisa berusaha untuk men-*spend* agar ekonomi masih bisa berputar dengan lebih kencang. Karena itu kita melihat bahwa defisit transaksi berjalan memang akan mengarah ke arah yang lebih besar.

Pemerintah memang kita berharap agar bisa fokus untuk mengembangkan industri untuk substitusi *import* sebenarnya. Terkait hal ini beberapa kendala memang yang kita lihat adalah mengenai kendala teknologi, sumber daya manusia, dan permodalan yang ada di Indonesia. Nah penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum juga menjadikan hal yang dilihat oleh investor asing dalam hal ini. Jadi pasar sebenarnya mengharapkan penerapan Omnibus Law di bidang perpajakan dan investasi, termasuk Undang-Undang Tenaga Kerja dan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat dipercepat dan mempercepat proses perizinan yang dan eksekusi investasi sehingga menimbulkan kepercayaan bagi pemodal asing untuk di Indonesia. Hingga investor juga bisa memperkirakan secara lebih akurat tingkat imbal yang diperoleh oleh investor.

Tantangan eksternal tentu banyak ya kita tadi Bapak juga sudah menyebutkan jadi adanya perang dagang, konflik militer antara Iran-Amerika sekarang, proteksionisme perdagangan termasuk paten dan isu lingkungan tentu memberikan tantangan bagi kita di Indonesia dan bagi produk Indonesia untuk dapat diterima di pasar global. Nah eskalasi konflik ini memang berpotensi untuk meningkatkan harga minyak. Nah harga minyak ini yang signifikan kalau berkembang ini akan berpotensi memperlebar defisit fiskal, mengakselerasi inflasi sehingga mengakibatkan penurunan harga SUN dan naiknya *yield* obligasi. Nah hal ini tentunya akan mempengaruhi modal asing dan jika terjadi *out flow* maka mengganggu stabilitas nilai tukar dan makro ekonomi Indonesia.

Nah kita berharap pemerintah dan saya rasa juga pemerintah sudah melakukan dan memikirkan langkah-langkah antisipasi untuk konflik ini. Jadi saya pikir itu mungkin dari kita. Pak Oki, Bu Lili mungkin ada lagi atau mungkin cukup ya Jadi saya pikir mungkin waktu dan tempat saya kembalikan, silakan pak.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak Oki?

Baik.

Pak Frenky dari Asosiasi Emiten Indonesia seluruh yang hadir, begitu juga Pak Oki ya dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

Ini kalau sistemnya saya lihat, tadi makanya saya tanyakan dengan Profesor Hendrawan. Apa.. bergantian Ketua-Ketua Umumnya. Namanya apa Prof? (Presidium) Presidium. Nah itu itu kalau di politik itu sesuatu yang ya luar biasa artinya kami jarang memakai itu, karena kalau berbagi Ketua Umum itu

begitu ya Ketua, harus berbagi rezeki juga. Nah Saya tidak tahu apakah di Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia ini juga rezekinya sama dari presidium ini? Nah itu bendahara yang tahu, karena masing-masing perusahaannya tentu berbeda-beda ya, tentu pendapatannya berbeda-beda begitu Pak Oki ya?

KETUA KKU APEI (OKTAVIANUS BUDIANTO/OKI):

(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Nah maksud saya, karena itulah barangkali bisa makanya presidium itu tadi Pak kan. Karena kalau sebenarnya Presidium itu pendapatannya harus sama, nah ini kan belum tentu sama kan begitu ya.

Nah satu hal sebelum nanti kita pendalaman terhadap rekan-rekan. Pak Franky, kita ini kan semua diberikan berkah berkat yang luar biasa ya Bapak Bapak kami semua di sini. Nah inilah saatnya sebenarnya kenapa kami mengundang Ibu Bapak untuk hadir di sini untuk juga memberikan masukan yang riil Pak Budi Arsa. Jadi bukan hanya sesuatu yang katakan mengambang atau apa tapi kita perlu. Karena kita di Komisi XI ini mengantisipasi betul dengan situasi dunia yang ada sekarang. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi juga sangat terbatas. Nah ini penting sekali bagaimana mengefektifkan. Kami di sini menyisir bahkan sampai anggaran yang sekecil-kecilnya, untuk bagaimana kepada masyarakat kecil supaya mereka bisa lebih lebih bisa *survive*. Karena ini lah yang kita bisa harapkan di penduduk yang ada 270 juta jiwa ini.

Nah mohon maaf kalau kopinya belum sampai Pak, karena sedang diracik ini kopi dibawa oleh Pak Sihar Sitorus rekan kami dari Humbang Hasundutan namanya kopinya apa tadi namanya? Tak.. Tabodo Pak. Jadi kalau minum kopi ini nggak bakal bodoh pak. Pasti makin makin pintar. Dan Pak Sihar Sitorus ini mirip-mirip Pak Franky, memang Raja sawit juga Pak. Jadi mungkin Bapak sudah udah tahu ya silakan lah itu ini kan tidak terkait presidium tadi itu ya Pak ya. *Monggo* saja.

Nah jadi karena tadi sudah disampaikan oleh para Ketua Umum AEI Dan APEI, nah tentunya rekan-rekan akan memperdalam. Bapak Ibu jangan sungkan untuk menjawab dan mungkin nanti rekan-rekan akan mendalami lebih jauh lagi karena memang kami ingin menggali sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena nanti dalam penyusunan Undang-Undang Omnibus Law kemudian juga dalam penyusunan perbaikan dari Undang-Undang OJK Pak, kami sedang mengevaluasi itu. Undang-Undang BI bahkan juga bursa apa namanya Bapepam dan juga kaitannya terhadap keuangan.

Nah untuk itu tentunya nanti sudah ada pendaftar-pendaftar yang akan mendalami dan bertanya di sini.

Langsung saja barangkali kami tidak ada lagi ya Pak supaya kami bisa langsung. Dari sisi sebelah kiri yang terhormat Pak Dolfie untuk dapat bertanya dan bersiap-siap dari sisi sebelah kanan yang terhormat Pak Jon erizal ya. Pak Misbakhun mendaftar ya. Pak Misbakhun yang terakhir aja biasanya Pak karena nanti beliau akan panjang lebar dan akan mendalami, nanti Bapak Ibu bersiap-siap. Di sini gunanya nanti presidium itu Bu, nah begitu karena supaya pertanyaan yang dalam itu nanti bisa dibagi dengan baik.

Silakan Bu Anis sudah sudah kami daftar. Bu Anis sudah, nanti abis itu Bu Vera Febriyanti sudah kami daftar.

Baik kami berikan kesempatan yang terhormat Pak Dolfie kemudian bersiap-siap Pak Jon Erizal.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi XI
Yang terhormat Bapak-Bapak dari asosiasi yang sudah menyampaikan paparannya.**

Pertama, tentu kami ingin mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak asosiasi dan Ibu. Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan kasus Jiwasraya, menyusul ASABRI nanti, yang semuanya nih pembobolan dari pada Jiwasraya maupun ASABRI. Itu melalui mekanisme yang ada di Bursa. Nah bagaimana menurut pengamatan Bapak dan Ibu agar saham-saham yang ada di Bursa ini memang mencerminkan fundamental dari kinerja perusahaannya? Nah itu bagaimana menurut pengamatan Bapak-Ibu? Apakah di sini pengawasannya yang lemah, kok bisa tetap terjadi jebol seperti itu? Nah itu bagaimana pengawasan menurut Bapak dan Ibu?

Kepada Asosiasi Emiten Indonesia dari paparan yang disampaikan di *slide* Nomor 4, di sini ada ditunjukkan tentang Asosiasi Emiten Indonesia, tersebar di berbagai sektor. Saya ingin mendapatkan tambahan penjelasan tentang kegiatan dari perusahaan-perusahaan ini di pasar modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia itu seperti apa? Maksud saya modal yang dihimpun melalui pasar modal, di dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektoralnya itu seperti apa dari sisi swasta itu?

Kemudian di *slide* nomor 9. Di *slide* nomor 9 dikatakan perlu ada evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Mungkin sudah ada dari asosiasi mengidentifikasi substansi-substansi pasal apa saja yang kira-kira perlu dievaluasi, atau ada substansi-substansi yang perlu dimasukkan di dalam Undang-Undang. Karena kebetulan nanti pada tahun 2021, pemerintah akan mengajukan Undang-Undang mengenai Sistem Keuangan. Nah mungkin substansi-substansi itu bisa kita masukan di dalam Undang-Undang yang baru itu.

Kemudian dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, dari jawaban yang disampaikan di Nomor 3, ini dikatakan bahwa masih ada *shallow* antara industri keuangan dalam organisasi OJK. Kemudian dikatakan juga SDM OJK diharapkan bisa lebih *market-oriented* dan memiliki *commercial mindset*. Nah saya ingin mengetahui fenomena-fenomena apa atau praktek-praktek apa di lapangan sehingga asosiasi berkesimpulan seperti ini? Itu yang ingin kita mintakan tambahan penjelasannya.

Tadi juga disampaikan adanya keluhan, sepertinya mengeluh ya kayaknya kok banyak sekali iuran dan pungutan. Nah mungkin OJK ini bertugas memungut, regulasinya memang oleh Peraturan Pemerintah, mungkin sudah saatnya juga peraturan pemerintah yang saat itu diterbitkan masa pemerintahan SBY perlu direvisi pada saat ini. Mungkin bisa disampaikan usulan-usulannya. Mungkin bisa disampaikan juga Bapak Ibu usulan-usulan

terkait dengan terkait dengan pungutan-pungutan itu. Mungkin dari saya itu saja. Mungkin teman-teman lain akan mendalami hal yang lain.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

H. DITO GANINDUTO, M.B.A. (KETUA KOMISI XI DPR RI/F-PG):

Pimpinan boleh interupsi sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan Ketua.

H. DITO GANINDUTO, M.B.A. (KETUA KOMISI XI DPR RI/F-PG):

Saya kira tadi pertanyaannya Pak Dolfie kalau kita sepakat, kita ini kan sebenarnya sekarang lagi *hot issue* mengenai Jiwasraya. Kemudian kita juga akan membuat Panja Pengawasan Industri Keuangan, kemudian kita akan rapat gabungan dengan Komisi VI mengenai Jiwasraya, kemudian kita juga besok dengan Bursa Efek Indonesia, dengan BPK dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya Pak Dolfie yang pertama mengenai Jiwasraya ini mungkin bisa dijawab lebih dulu nggak Pak, supaya kawan-kawan yang lain tidak mengajukan pertanyaan yang sama kalau tidak keberatan. Itu ya khusus mengenai Jiwasraya dulu.

KETUA RAPAT:

Pak Dolfie tidak keberatan? Silakan.

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA):

Pimpinan.

Kalau saran saya, dengar.. mungkin topiknya sama Jiwasraya, tapi *angle*-nya berbeda. Jadi mereka bisa jawab komprehensif sebaiknya ditunggu supaya jawabnya sekaligus gitu, terimakasih. Setelah yang lain Pak, karena mungkin Jiwasraya pertanyaannya, tapi *anglenya*, sudutnya beda gitu. Jadi kita tunggu supaya mereka jawab satu kali.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau begitu nanti dijawab setelah yang berikutnya.

Sekarang kami berikan kesempatan yang terhormat Pak Jon Erizal, dan kemudian bersiap-siap Profesor Hendrawan Supratikno.

F-PAN (H. JON ERIZAL, SE., MBA):

Ya terimakasih Pimpinan.

**Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi XI,
Bapak-Bapak dan Ibu dari APEI maupun AEI.**

Makasih paparannya.

Saya langsung ke beberapa hal yang *soft landing* dulu Pak. Kemarin kalau nggak salah di sini juga ditulis Bu Sri Mulyani minta 1.000 target Pak ya emiten. Kok yang minta Ibu Sri Mulyani? Heran juga saya. Kan ini bukan targetnya Menteri Keuangan. Nah ini tolong direspon ini. Jadi jangan sampai nyebrang ke mana-mana juga juga harus direspon oleh industri juga atau oleh asosiasi. Yang nentukan target nih siapa gitu, supaya sinkron. Itu satu.

Nah kemudian atas target tersebut ini menarik, nanti ujungnya ke Jiwasraya. Kita mau uber-uberan jumlah emitenkah atau kita mau uber-uberan kualitas emiten yang ada, kita. *Once*, itu terjun ke *market* IPO dan masuk melalui Asosiasi Perusahaan Efek melalui Sekuritas Company tentunya itu kan nanti akan muncul ada perusahaan baik, sedang, tidak baik kan. Nah apabila publik yang mau berinvestasi beli yang tidak baik, apakah itu salah? Nah ini harus bisa diterjemahkan dulu gitu loh. Termasuk sekarang kita lihat Jiwasraya. Sekarang mereka investasi di satu perusahaan publik. Apakah salah kalau mereka nanti jawab misalnya oh itu ada di pasar. Saya datang ke pasar ikan ada ikan yang baik, ikan segar, ikan busuk juga. Kalau beli ikan busuk apa orang yang belinya salah? Nah ini juga 1 *question mark*, karena kalau hal ini terjadi dan ini terjadi pembiaran, akan jebol nih ekonomi. Jadi tolong nanti respon dari teman-teman ini penting, pada saat kami membahas lebih dalam soal di Jiwasraya gitu. Apakah nanti si investor ini salah karena dia beli ikan yang busuk tadi? Karena secara regulasi mereka udah IPO, udah resmi. Udah dilihat oleh lembaga-lembaga yang memang *otorize* untuk mengatakan *fine* untuk IPO. Jadi kalau ada 1.000 apalagi 2.000 dan 3.000 nanti sebagian besar itu busuk nanti bagaimana ini bisa berkembang gitu. Nah ini suatu pertanyaan yang menurut saya perlu kita bahas bersama.

Nah kemudian kalau tadi disampaikan oleh Pak Franky bahwa asosiasi ini berperan banyak terhadap anggota gitu. Saya mau tanya punya *pressure* apa Pak untuk agar anggota ini bisa *compliances* seperti yang Bapak maksud tadi. Apa *pressure* yang asosiasi punya? Kalau tidak punya *pressure* itu saya rasa anggota akan berjalan sendiri-sendiri. Misalnya ada salah satu anggota Bapak menggoreng-goreng sahamnya, menggoreng-goreng kemudian dilakukan melalui perusahaan efek, Sekuritas Company. Terus ini sejauh mana ini masing-masing baik APEI maupun AEI ini bertanggungjawab terhadap kondisi seperti ini? Ini kan terjadi di *market* sekarang pak, dan kemungkinan besar juga setiap perusahaan-perusahaan yang mau IPO pasti sudah *melobby* semua itu Pak. *Melobby* asuransi, *melobby* dana pensiun dan lain-lain gitu. Nah harapan kita mudah-mudahan perusahaan itu berjalan baik. Kalau tidak baik terus seperti apa? Bagaimana nanti uang-uang yang sekarang ditempatkan oleh masyarakat di asuransi seperti di ASABRI dan seterusnya itu, Jiwasraya. Nah ini untuk hal-hal yang dua lembaga ini, asosiasi ini.

Begitu juga berkaitan dengan mungkin dengan *misplacement* tadi gitu. Dia sudah terlanjur beli di perusahaan-perusahaan yang memang tidak bisa

tumbuh, nah ini peran masing-masing asosiasi dan perusahaan ini seperti apa? Tentu pertanyaan ini akan kami pertanyakan juga kepada OJK pada saatnya nanti.

Kemudian produk-produk juga kan tadi disampaikan menarik ini disampaikan oleh Pak Oki, kalau nggak salah tadi kami yang kami jual *security* Pak, keamanan. Beda dengan *fintech*, tapi lapangan kan ternyata lebih tidak aman Pak sekarang ya. Berapa puluh triliun sekarang di lapangan itu terjadi. Jadi jualan Bapak seperti ini juga mungkin perlu di *review* ulang gitu lho yang mana yang bikin *secure*-nya nah ini juga.. nah kemudian untuk itu bisa *secure*, usulan-usulan apa di Undang-Undang yang perlu kami bantu Bapak-Bapak semua untuk membicarakannya dengan Pemerintah agar Undang-Undang itu bisa direvisi.

Nah kemudian di samping nanti Undang-Undang yang berkaitan dengan OJK yang akan kami revisi, dalam waktu dekat tadi Bapak-Bapak udah tahu bahwa ada Omnibus Law. Nah ini seperti apa yang tadi kan disebut pajak, pajak pada saat transaksi 0,1%, pajak pada saat mau IPO 0,5 dari *Cap* dan seterusnya itu. Itu seperti apa? Ini kan ada rencana penggabungan pajak-pajak tersebut. Nah ini tolong diusulkan Pak, Bapak-Bapak lebih paham soal itu. Nah kalau bisa diusulkan sekarang akan lebih bagus, tapi kalau ndak tentunya kami tunggu tertulis.

Demikian Pimpinan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Jon Erizal. Kemudian berikutnya kami berikan kesempatan kepada Profesor Hendrawan Supratikno dan bersiap-siap Pak Andreas Susatyo.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

**Pimpinan Komisi yang saya hormati, rekan-rekan Komisi XI
Selamat sore dan salam kebangsaan.**

Yang pertama Pimpinan, setiap kali saya bertanya selalu dimulai dengan Professor, sementara yang lain tidak disebut gelarnya. Jadi mungkin lain kali cukup Hendrawan saja Pak ya, karena di politik itu lebih provokator dibanding..

KETUA RAPAT:

Kalau sudah izin beliau kan kita boleh ya Pak ya.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Karena yang lain-lain juga gelarnya ini kan banyak yang dokter sudah. Baik, nggak ini bergurau saja.

Jadi yang saya hormati.

(suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Saya pun tidak serius Pak Andreas, Pak Hendrawan.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Tapi betul karena profesor itu nama saya mudah diingat oleh konstituen Pak Ketua.

Baik jadi,

Yang saya hormati Pak Franky Welirang dengan jajarannya,

Ini Pak Franky setiap kali kita bicara dengan dunia usaha selalu tampil. Dulu di Komisi VI kita mengundang Badan Perlindungan Konsumen Nasional juga Pak Franky ini memang pelaku dunia usaha yang beken, dikenal memiliki integritas tinggi.

Pak Oki dengan jajarannya yang saya hormati,

Ya pertama hari ini kita berbicara mengenai 1 jenis pasar yang tingkat *assymetric information*-nya, informasi ketidaksetaraan itu sangat tinggi. Jadi setiap kali kita bicara contoh pasar yang tingkat information asimetrik nya tinggi adalah pasar modal. Yang dijual harapan ya, kalau harapan itu bohong doang, dia tinggal janji dan kertas-kertas tumpukan kertas yang mungkin kalau di kilo hanya 200 rupiah 1 kg.

Nah pasar yang demikian ya pasar yang kejam ya itu sebabnya dari pasar modal ini lahir istilah-istilah seperti *market has no mercy*. Pasar tidak memiliki bela kasihan, *market has no memory*, pasar tidak punya romantisme. Kejam ya. Semua jenis tipuan ya kita bisa pelajari dari sejarah pasar modal. Itu sebabnya pasar ini harus diregulasi secara sangat ketat.

Di Indonesia yang terjadi *over regulated thoughtless supervise* banyak aturannya tapi pengawasannya kendur, bahkan di ILC kemarin kami mendengar bagus sekali itu ya yang *non compliance* sengaja dipelihara. Yang *compliance* tidak disukai karena yang *compliance* tidak bisa dikenai denda, tapi yang *non compliance* yang nggak taat ini, ini bisa dijadikan sumber namanya *the fortune flows*, arus rejeki.

Nah Ibu Bapak dan Saudara-saudara itu sebabnya hari ini saya ingin memulai dengan pertama berterimakasih untuk masukan-masukan yang diberikan termasuk tadi PP Tahun 2014 tentang Pungutan. Kemudian di sini ada usulan juga agar Undang-Undang Pasar Modal yang sudah *out of date* itu segera direvisi. Nah mohon AEI atau APEI ini mengirimkan pokok-pokok apa yang bisa direvisi agar teman-teman ini ya mempercepat proses legislasinya. Karena kami lihat 25 tahun juga sudah ya ini sudah 6 kali presiden ya, ya memang sudah saatnya ya di ganti. Jadi itu yang pertama.

Yang kedua, saya tertarik ini masalah besar sekali ya. Ibu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI mengatakan ya integritas pasar kita secara berkala diuji dengan praktek-praktek yang sangat kotor. Orang-orang yang sengaja menyebar racun di pasar kita. Itu sebabnya agar sehat perlu detoksifikasi, penegakan peraturan. Ya tadi Pak Dolfie mengatakan pasar

modal jadi instrumen para pencoleng ekonomi ya, penggerogotan ya keuangan negara dan seterusnya, praktek-praktek yang tidak kita apa, ya praktek-praktek yang.. Pak Jokowi sendiri mengatakan ya dihindari saham gorengan padahal pasar tanpa spekulasi ya pasar modal tanpa spekulasi itu ibarat ya kopi ya ...(rekaman terputus)... ya kalau mendengar lagu Bengawan Solo langsung ya atau harimau yang denger lagu bengawan solo langsung jinak gitu nggak bisa. Pasar ini kejam. Itu sebabnya tolong upaya-upaya melakukan detoksifikasi ini ya terus dilakukan oleh para pelaku pasar ya.

Nah dalam kaitan dengan detoksifikasi itu, saya ingin bertanya kepada Pak Franky dan Pak Oki, Nikkei Securities membuat penelitian yang mengatakan bahwa 14% sampai 25% perusahaan yang *listed companies* ya ini mereka sebut *zombie companies*, mayat hidup ya. Nah ini kalau kami diberi masukan tentang ya karena bursa efek juga punya lembaga penelitian Pak Eriko, ya ini akan sangat membantu kami untuk ikut apa memperkaya ya nanti dalam regulasi.

Yang terakhir ya ini pelaku pasar membuat perkiraan pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,3% pertumbuhan ekonomi 2020. Saya kira orang nggak perlu sekolah untuk membuat ya perkiraan dengan rentang yang iya ya itu sebabnya Pak Oki, Pak Franky di Indonesia ini ada istilah *forecasting* peramalan, ada istilah *prediction* prakiraan, dan ada *estimation* perkiraan. Nah kalau *estimation* itu kita belajar statistik ada *point estimation* dan *interval estimation*. Saya pikir tadi pak Karman ya kalau bisa buat yang ya misalnya seperti saya mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 4,82 sampai 4,98, deviasinya sangat iya saya pertaruhkan dengan *software* yang saya miliki. Tapi kalau 4,5 sampai 5,3 *nyuwun sewu* ya mbok-mbok nggak usah diberi tahu ya ya pasti begitu tidak akan tidak ada salahnya. Sama dengan kita meramalkan besok hari bisa hujan, bisa tidak, pasti benarnya karena bisa hujan dan bisa tidak.

Saya kira itu saja Pimpinan, dari pelaku pasar ini kita berharap banyak mudah-mudahan ya dengan perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan melalui fungsi yang dimiliki DPR ya pasar modal kita berkembang sebagaimana cita-cita kita bersama.

Terima kasih dan salam kebangsaan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hendrawan Supratikno maaf Profesor Hendrawan Supratikno.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Terimakasih Pak.

KETUA RAPAT:

Yang berikutnya yang kami hormati Doktor Andreas Susetyo dan selanjutnya bersiap-siap Bapak Harry Purnomo.

Saya mohon izin Pak Franky Welirang, Pak Budi Arsa, Bapak-Bapak, Ibu yang hadir di sini Pak Oki, karena di sini ada Pimpinan kami ada Ketua rasanya tidak baik ada Ketua Wakil Ketua yang memimpin. Jadi kami serahkan kembali kepada Ketua, karena tadi beliau minta saya untuk meneruskan ya dan

memang saya jam 4 ini juga sudah ada janji. Kan janji harus ditepati ya Pak. Nah kan begitu seperti bursa ini kan asosiasi ini kan janji harus ditepati. Nah karena itu kami mohon pamit kalau ada kata yang salah dari saya Eriko Sotarduga mohon maaf senang ketemu Ibu Bapak sekalian semuanya. Izin Ketua, izin rekan-rekan Anggota Komisi XI, kami pamit dulu.

Silakan Ketua dipimpin.

**(POSISI KETUA RAPAT DIALIHKAN KEPADA
H. DITO GANINDUTO, M.B.A./ KETUA KOMISI XI DPR RI)**

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./KETUA KOMISI XI/F-PG):

Baik, baik.

Ini hebatnya politisi ini, padahal dia bilang.. serep silakan teruskan gitu (tertawa). Silakan Pak Eriko. Jadi kalau saya memimpin sini berarti nanti di Berita Satu setengah lima Pak Eriko. Kalau saya nggak mungkin selesai, jam 4 selesai nggak kira-kira? Nggak kan. Nah kalau nggak selesai saya harus di sini berarti Pak Eriko yang ke Berita Satu. Ini kita bagi-bagi tugas sih.

Baik silakan, siapa tadi Pak Andreas? (ya) Ya silakan Pak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM):

Terimakasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI, Pimpinan Asosiasi Emiten Indonesia beserta tim dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

Hari-hari ini adalah hari-hari yang sebetulnya cukup kelam untuk industri keuangan kita dan intinya adalah bagaimana kita mengembalikan kepercayaan ini. Ini tadi Pak Franky mengatakan mengenai bagaimana kita meningkatkan *rating* Indonesia tetapi yang sekarang terjadi adalah bukan hanya *rating* Indonesia tetapi juga kegamangan masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi.

Terus terang tadi dikatakan kalau dikatakan masih belum banyaknya jumlah salah satu permasalahan *go public* dan masih kurangnya jumlah investor walaupun tahun lalu itu tahun 2018 jumlahnya cukup banyak meningkatnya hampir 44%, 1,6 juta tetapi sekarang kalau kita tahu masyarakat bingung mau investor *invest* kemana nih ya. Mau *invest* ke perusahaan negara yang 100% milik pemerintah pun lewat bank *insurance* yang penjualannya lewat bank-bank besar, bank-bank ternama pun juga bermasalah. Terakhir justru investasi bodong ini yang terakhir itu memeles itu yang bisa memeles 750 M itu karena aplikasi. Belum yang lain-lainnya, belum yang lainnya juga (..) dan seterusnya.

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah tadi disebutkan oleh Pak anu dari Asosiasi Efek Indonesia ini kan ada 3 pihak ini ada regulatornya, ada kemudian perusahaan efeknya dan emitennya. Kalau kita lihat regulator tadi masukan dan kita pada saat pembicaraan masalah membahas pengawasan dan juga anggaran OJK, kita sorotin. Apakah tadi kalau saya lihat ada salah satunya adalah ternyata bahwa kejahatan ini kalau kita mengatakan terjadinya kejahatan ini salah satunya adalah masalah belum terintegrasinya sistem

keuangan. Artinya bahwa yang disebut dengan *arbitrase regulatory* itu terjadi. Ini ini ini karena ini menyangkut hal yang sangat signifikan karena organisasi OJK yang *shallow* ini harus benar-bener akhirnya dirombak.

Dan kemudian kita lihat juga aturan-aturannya kita lihat Undang-Undang Pasar Modal yang sejak tahun 1995 sudah *out of date* dan seterusnya. Kalau kita lihat hukuman atau sanksinya pun juga sangat rendah. Bayangin aja yang sudah demikian cuma katakanlah kena sanksi administrasi 5 miliar ya padahal di keruk sudah berapa. Jadi ini sebetulnya tidak apa tidak sesuai lagi gitu ya dan seterusnya.

Nah dalam hal ini khususnya untuk emiten, saya menaruh perhatian secara khusus berdasarkan data yang kami miliki itu pada per 11 Juni tahun 2019 itu PT Bursa Efek Indonesia memberikan notasi khusus pada 51 saham atau emiten dari 632 ini kan artinya 8%. Notasi khusus macam-macam, ada yang misalkan ya kodenya kan macam-macam ada B itu pailit, ada M itu adalah penundaan pembayaran utang, ada sampai kemudian belum menyerahkan laporan keuangan dan seterusnya. Dan lebih 1 perusahaan itu lebih dari 3 notasi. Nah pertanyaannya adalah ini gimana ya *compliance*-nya atau *good corporate governance*-nya karena saya melihat nanti kita melihat juga dari segi regulator tapi dari perusahaan emitennya sendiri gimana?

Terus kita lihat juga contohnya kantor akuntan publiknya ini kita sedang sebetulnya juga nanti bicarakan dengan Kementerian Keuangan sebagai pembina kantor akuntan publik diharuskan pakai *The Big Five* seperti BUMN tapi kenyataannya ya kita lihat pembukuannya Garuda ada *restatement*.

Jadi intinya adalah masing-masing pihak menurut kami harus kemudian mengkaji ulang. Di sisi emiten saya berkali-kali agak heran juga, saya termasuk juga ikut-ikutan mainlah. Itu kalau perusahaan yang udah mau *go publik* itu, *initial offering*-nya tiba-tiba sehari kemudian *auto reject*, saya juga heran loh sehari kok bisa naik 35%, tapi barang itu nggak ada, di pasar sekunder nggak ada, nah ini siapa yang *nge-keep*. *Nge-keep* kan kita tahu nih. Nah kalau *real strategic investor* enggak apa-apa. Tapi kalau *strategic investor* ini adalah *owner* dan *Cs* nya *owner* kan ini sebetulnya sudah dari awal semu. Coba kita lihat 1 hari 35% naik dan *auto reject* hari kedua juga ini, ini kan sebetulnya ya semua pihak termasuk dalam hal ini ada emiten sendiri dengan ininya. Ini menurut kami hal-hal yang seperti ini perlu kita pikirkan dengan baik gitu. Contohnya juga pada saat pembahasan anggaran kepada OJK kita juga menanyakan dengan OJK, ini gimana manajer investasi reksadana baru sebulan tiba-tiba turun 35%, padahal bursa kita sendiri pun turunnya cuma berapa walaupun ini turun naiknya. Jadi apakah bursa ini memang menjadi ajang spekulasi? Memang ya, tapi apakah demikian parahnya gitu. Sehari 35%. Coba begitu.. makanya kita kan rebutan perusahaan apa istilahnya kalau tapi barang itu susah, pasar sekunder juga nggak ada, tiba-tiba ini menunjukkan distribusi sahamnya itu tidak merata.

Nah saya nggak tahu nih peran daripada *underwriter* dan segala macam termasuk di sini adalah bagaimana perusahaan sekuritas juga berusaha menjaga hal kayak gini. karena kembali kalau kita mau memang katakanlah meningkatkan pasar modal kita ini adalah kuncinya memang di kepercayaan ya. Saya melihat angka terus terang aja angka 51 emiten tuh besar dibanding 632 ya itu 8% an lebih 8,01%. Jadi maksud kami adalah semua pihak baik itu emiten dan ini kita harus juga bicara regulator nanti kami diberikan masukan, tapi gimana juga tata kelola. Apakah misalkan contohnya Undang-Undang

Kepailitan kita nih perlu direvisi, perlu di evaluasi kembali. Hal-hal kayak gini. Kalau kita lihat ini di bank itu kan begitu-begitu dia masuk ini, kemudian dia dengan mudah menyatakan kepailitan. Nah hal-hal semacam ini yang perlu kita masukkan sehingga kita bisa betul-betul mengembangkan pasar modal kita yang kuat dan sehat.

Nah tadi disebutkan juga masalah peningkatan jumlah investor. Saya ingin mendapat pandangan mengenai kecukupan dari tenaga profesi di pasar modal yang sudah memiliki sertifikasi, karena ini pertanyaan tadi itu manajer investasi, nah ini jangan dikritisi, mereka masuk kepada manajer investasi dengan reksadananya tapi tiba-tiba sebulan turun 35% yang menjalankan untuk bank *insurance* itu semua ada sertifikasinya, apakah sekarang ini terjadi karena mereka tidak bersertifikasi? Apakah bersertifikasi tapi kemudian juga yang menjadi masalah *misconduct* atau apa? Kan salah satu yang juga kita perlu tegakkan kan sebetulnya *market conduct*-nya nih. Nah ini perlu apa istilahnya tuh kita mendapatkan masukan.

Terus yang menarik tadi dikatakan dan menurut kami ini adalah sangat penting. Apakah dengan ditarik iuran tadi dikatakan salah satunya adalah OJK ini sebaiknya didanai oleh APBN? Ya itu itu masukan ini. Saya hanya menginginkan bahwa apakah dengan adanya iuran ini sehingga salah satunya OJK dalam tanda kutip menjadi "kurang bergigi" atau gimana? Karena ini menyangkut mendasar ini kalau demikian. Artinya bukan hanya mereview mengenai pungutannya, tapi bahwa masalah independensi ya padahal kita lihat salah satu ya waktu itu kita membuat Undang-Undang OJK adalah sebetulnya bagaimana OJK ini bisa mengatur, mengawasi dan melindungi nah ini yang belum ada di sebelum-sebelumnya ini melindungi, tapi kenyataannya sekarang tidak ada perlindungan kepada investor ya.

Ini ini ini hal yang sangat penting menurut saya dan lebih baik kita lihat secara menyeluruh ya, karena kalau menurut saya udah demikian ya perusahaan *go public* udah semua apa ya udah dikulitin habis tata kelola manajemennya, aturannya segala macam lah tapi kok masih bisa terjadi seperti ini, maaf 1 emiten, *what's wrong* gitu? Itu yang sebetulnya perlu sama-sama kita bicarakan.

Saya kira demikian Pimpinan. ‘

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terimakasih Pak Andreas.

Selanjutnya kami persilakan Pak Harry Poernomo tapi sebelumnya kita sepakati kita selesai jam 4.45 bisa? Jam 5 kurang seperempat sampai kesimpulan. Bisa Pak ya? Setuju ya? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Jadi mohon dipersingkat pertanyaan.

Silakan Pak Harry Poernomo kemudian siap-siap Pak Budi Ashari.

F-P GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

**Pimpinan dan teman-teman sejawat anggota Komisi XI yang saya hormati,
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Asosiasi Emiten maupun Asosiasi Perusahaan Efek ya yang saya hormati.**

Saya tidak ingin mengulang beberapa masukan atau pertanyaan komentar, tanggapan dari teman-teman yang sudah terdahulu ya untuk menyingkat waktu walaupun saya mungkin masih sedikit nyerempet-nyerempet ya.

Yang pertama, saya sangat sependapat apa yang tadi disampaikan oleh Prof ya pasar ini memang kejam dan kebetulan memang sudah dibuktikan sendiri bahkan mungkin diakui ya oleh APEI dan apa persatuan asosiasi perusahaan yang *listed* maupun perusahaan efek ini sendiri. Saya pelajari sama sekali di situ tadi juga disinggung oleh Pak Andreas, sama sekali dalam visi misinya atau dalam kegiatannya tidak ada visi maupun misi untuk melindungi investor ya. Kalau saya tidak salah baca ya. Kemudian juga memberikan contoh di beberapa negara bahwa asosiasi atau perkumpulan perusahaan ini merupakan *self regulatory body* atau *self regulatory organization*. Saya pikir itu gagasan yang baik ya tetapi juga memerlukan dukungan lingkungan yang memang sudah kondusif. Artinya unsur apa integritas, kejujuran ya, *trust* itu memang sudah terbangun, tetapi kebetulan mohon maaf masyarakat kita ini kebetulan dari lingkungannya kelihatannya belum memungkinkan ya untuk APEI maupun Asosiasi Perusahaan Emiten maupun Perusahaan Efek ini menjadi *self regulatory*. Jangankan menjadi *self regulatory body*, diawasi saja kita masih belum bisa berjalan dengan tertib ya.

Tadi juga Pak Andreas sampai mengatakan apa yang salah sebetulnya di kita ini ya. Nah, di dalam kegiatannya saya berharap ada apa ya perubahan sebelum kita merubah regulasi Undang-Undang ya. Saya harapkan dari APEI ataupun perusahaan apa efek ini juga ikut apa ikut berkontribusilah di dalam menseleksi emiten-emiten ini. Tadi juga sudah disinggung sebetulnya. Sehingga perusahaan yang *listed* di bursa itu benar-benar sudah *proven* layaklah untuk diperdagangkan sahamnya. Jangan sampai kepentingan nasabah atau investor ya maaf investor ini dipertaruhkan karena mereka sudah terlalu percaya atau mungkin menganggap perusahaan yang *listed* itu sudah terbukti layaklah.

Oleh karena itu pertama permintaan saya sebelum memberikan masukan untuk perubahan atau revisi regulasi, tadi banyak berulang kali disinggung Omnibus law ya tetapi APEI maupun apa perusahaan emiten ini juga di dalam dirinya juga ada kegiatan yang secara khusus ya ikut merekomendasikan kepada regulator, Bursa Efek untuk menseleksi perusahaan-perusahaan. Walaupun kita tahu karena semua perusahaan yang *listed* itu kan di di monitor. Kalau ada yang apa *grade*-nya naik turunnya diberikan notasi tetapi dari asosiasi-asosiasi ini ya harapan saya juga ikut kontribusi dalam menseleksi ini. Karena bagaimanapun kami kami ini kan lebih mewakili kepentingan masyarakat. Jadi visi misi kami sebagai Anggota DPR itu lebih kepada melindungi, tidak hanya apa meningkatkan kinerja pemerintahan

saja tapi lebih kepada perlindungan ya. Oleh karena itu harapan saya kedua asosiasi ini juga punya visi misi yang intinya juga melindungi bisa.. jangan malah kita sebagai asosiasi malah apa ya artinya memanfaatkan kondisi pasar yang tadi oleh Profesor Hendarman itu di.. Hendrawan itu dinyatakan pasar ini tidak punya belas kasihan, jangan kita malah menumpangi itu.

Kemudian pertanyaan saya kalau tidak salah dengar tapi APEI atau perusahaan efek ya atau emiten itu. OJK itu mendapat *fee* dari setiap transaksi efek yang diperdagangkan begitu? Apa begitu umpamanya? Mohon maaf. Bukan ya? Pendapatan ya tahunan, bukan setiap transaksi. Kalau begitu saya salah, iuran ya. Bukan setiap transaksi. Saya sebetulnya pernah menyampaikan pendapat yang sama kalau tadi apa OJK itu sebaiknya dibiayai oleh APBN, saya pernah mengemukakan ini kepada Menteri Keuangan dan juga seingat saya kepada OJK, karena apa? Ini berarti akan menambah beban pungutan. Sebenarnya kita sebagai pelaku usaha atau sebagai warga negara sekali kita sudah bayar pajak ya itu sudah cukup ya, kita harus mendapatkan *feedback* dari pemerintah regulator karena kita sudah membayar pajak tidak perlu ada pungutan-pungutan lain, mungkin ini salah satu inefisiensi yang membebani ekonomi kita. Saya sangat sependapat mudah-mudahan nanti gagasan ini bisa di terima di dalam revisi Undang-Undang OJK.

Di dalam kesempatan rapat kerja dengan OJK pada waktu itu atau dengan Menteri Keuangan saya lupa, bahkan saya punya gagasan ya kalau perlu dikembalikan saja unsur tugas-tugas OJK ini ke BI seperti dulu. Tidak harus berdiri lembaga tersendiri. Saya tidak punya pengalaman bagaimana sebelum ada OJK pada waktu ada Bapepam ya, Bapepam. Seizin Pimpinan interaktif ya dari kaca mata pelaku, mana yang lebih baik sebetulnya, era Bapepam atau OJK? Walaupun OJK ini belum berumur ya sebetulnya ya, 6 tahun. Bapepam, saya tidak pernah mendengar ada masalah juga Bapepam itu saya tidak tahu. Banyak-banyak ya. Kalau Bapepam itu dibiayai oleh APBN waktu itu saya kurang paham waktu itu. APBN ya, PNS. Kinerjanya apa lebih buruk dari OJK yang sudah dibayar lebih mahal, lebih tinggi? Saya tidak punya latar belakang itu. Oleh karena itu tadi disebutkan APBN tadi untuk membiayai OJK saya pikir itu salah satu pendapat yang menarik.

Dari saya intinya, harapan saya karena kita berharap bursa ini berkembang, tetapi juga dari para pelaku baik perusahaan yang *listed* ya asosiasi perusahaan *listed*, kemudian juga dari asosiasi perusahaan apa pedagang efek pengusaha efek ini juga ada apa ya dalam konteks *self regulatory* tadi juga ada seleksi dirinya sendiri lah supaya perusahaan-perusahaan yang *listed* tu betul betul betul bisa dipercayalah untuk diperdagangkan. Jangan malah kita apa ya menumpangi situasi yang kisruh tadi yang tadi yang tadi Pak Andreas menyampaikan satu hari bisa naik turun 30% kan itu suatu hal yang yang apa ya yang aneh, tapi kelihatannya malah kita memanipulasi itu, memanfaatkan itu.

Jadi menurut saya memang diperlukan integritas dalam hal ini. Kalau kita mengharapkan bursa ini maju ya harus bisa mendapatkan *trust* dari pasar itu sendiri. Mungkin perkembangan atau pertumbuhan bursa selama ini yang belum memuaskan karena memang tidak ada *trust* dari masyarakat kita. Sama saja kenapa sih kok pasar keuangan di Indonesia kok pertumbuhannya kok tidak seperti di negara-negara lain? Ya karena kita memang masyarakat belum percaya kepada lembaga-lembaga yang apa bergiat di sektor keuangan. Banyak disebutkan, kita kurang banyak apa ya pilihan pasar keuangan kita.

Perlu banyak upaya-upaya untuk pendalaman pasar dan lain sebagainya tapi ...**(rekaman terputus)**..

Dari saya hanya itu Pimpinan, terima kasih dan sekali lagi saya harapkan kedua asosiasi ini juga punya kewajiban lah untuk di dalam aktivitasnya itu ada seleksi dirinya sendiri agar supaya pasar ini dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Harry Poernomo.

Selanjutnya.. ini udah tercatat, Pak Rudi dulu mungkin Pak Hasbi. Sudah tercatat Pak Rudi. Silakan Pak Rudi dulu setelah itu baru Pak Ansori Satori, baru Pak Hasbi, silakan.

(rekaman tidak jelas)

Heh? Bu Vera nggak ada namanya Bu Vera.
Oke silakan Pak Rudi.

F-P NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., MAP.):

Baik. Makasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua, seluruh Anggota.

Yang saya hormati asosiasi emiten dan seluruh jajaran yang hadir.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Saya di sini hanya ingin bertanya, memang tidak jauh-jauh dari permasalahan yang lagi panas gitu. Yang saya ingin tanyakan karena saya sering didatangi awak media dan wartawan tentang.. saya pun bingung Pak ditanyain Pak Rudi Gimana cara menggoreng saham katanya gitu. Jadi saya bukan ahlinya ini saya bilang. Jadi pas ini ada Bapak-Bapak ini orang efek bursa semua kan, emiten, jago-jago main saham ini kan. Saya mohon penjelasan pak cerita yang Jiwasraya itu sedikit aja nggak usah detil Pak nanti, bagaimana cara menggoreng kayak ikan ya Pak ya, jadi bagaimana menggoreng harga misalnya pertama beli 1.400 beberapa waktu digoreng turun jadi 300. Bagaimana teknisnya Pak gitu? Maksudnya supaya saya juga nanti ketika ditanya oleh awak media tidak salah Pak, gitu. Karena ada juga yang ngomong kesalahannya dari tahun yang lama, tapi ada satu sisi masalah goreng-goreng goreng saham ini Pak gitu. Nah itu Bapak-Bapak ini yang orang di Bursa itu yang pertama Pak.

Kemudian yang kedua, Bapak-Bapak kan juga termasuk kelompok industri IKNB Pak ya. Itu apa Pak kalau di pasar modal Pak? Yang saya ingin tanyakan Pak, kalau Bapak dikutip oleh OJK misal 0,4% ya kan dari nilai apa aset Pak? Lalu saya ingin bertanya Pak, OJK itu kan artinya dihidupin oleh Bapak semua ya kan? Gajinya Bapak yang ngasih, operasionalnya Bapak.

Saya ingin tanya, berani kritis nggak mereka Pak? Gitu. Maksudnya berani marah-marah atau “oh nggak beres tuh bro”, gitu. Berani nggak Pak? Nah gitu itu yang saya maksud karena ini permasalahan yang Bapak, Bapak-Bapak dengar di media di mana, itu tidak terlepas dari masalah disalahkan OJK ini gitu. Nah makanya saya mohon penjelasan dari Bapak-Bapak ini yang orang-orang pintar di bursa di efek itu tolong dijelaskan. Jadi ketika kami nanti ditanya awak media ketika kami RDP dengan OJK kami bisa menyimpulkan Pak. Wah Bapak OJK baiknya nggak usah minta uang pungutan lagi supaya independen misalnya gitu. Baiknya dari APBN misalnya, itu jalan keluar gitu.

Saya pikir itu saja pak, terimakasih. saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya kami persilakan Pak Satori, setelah itu Pak Hasbi. Silakan Pak Satori.

F-P NASDEM (SATORI, S.PdI., M.M.):

Terima kasih.

Seizin Pimpinan Komisi dan rekan-rekan Komisi XI dari Asosiasi Emiten Indonesia dan juga dari APEI asosiasi perusahaan Efek Indonesia, mungkin beberapa bulan yang lalu itu pernah ada himbuan atau arahan dari Pak Wakil Presiden bawa asosiasi emiten di dorong untuk menggandeng UMKM dan mengembangkan Syariah. Apakah sudah berjalan? Kalau memang sudah berjalan mungkin sudah berapa persenkah berjalannya itu Pak?

Kemudian yang kedua kami tidak menyinggung masalah Jiwasraya, cuma sekedar ini saja Pak nanya saja, standar ukurnya itu apa Pak orang tertarik untuk beli saham?

Kemudian selanjutnya, bagaimanakah caranya menimbulkan kepercayaan bagi investor agar mau berinvestasi? Apakah ada proteksi jika terjadi misalnya sahamnya anjlok atau turun Pak. Tiba-tiba jauh. Apakah tidak ada penjaminan? Kalau ada, dari berapa nilai investasi akan dijaminakan berapa gitu Pak? Agar supaya kita tidak sama-sama ada, karena memang resikonya tinggi untuk berinvestasi dalam bursa saham. Jadi supaya jelas kita juga bisa mengetahuinya.

Terima kasih itu saja dan sekaligus mungkin rekan-rekan Komisi XI dan dari emiten dan dari APEI, saya ijin undur diri karena jam 4 harus ada rapat fraksi.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA ASOSIASI EMITEN (FRANSISCUS WELIRANG):

Izin Pak, namanya? (Satori) Pak Satori ya.

F-P NASDEM (SATORI, S.PdI., M.M.):

Satori Pak dari Fraksi Nasdem, Dapil Jawa Barat VIII, Cirebon Cirebon Indramayu. Pak Hasbi dilanjut aja Pak Hasbi.

F-P NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.):

Tanpa mengurangi rasa hormat dengan Ketua tidak mengkuudeta (tertawa).

KETUA RAPAT:

Lanjut Pak.

F-P NASDEM (HASBI ANSHORY, S.E., M.M.):

Terimakasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati,

Saya Hasbi Anshory A-355 dari Fraksi Nasdem Dapil Jambi.

Ini kebetulan yang di hadapan kita ini adalah asosiasi emiten dan asosiasi efek. Berarti dia kan mempunyai anggota yang cukup banyak. Yang sedikit saya tanyakan, yang namanya bursa itu kan adalah kepercayaan dulu ada namanya sistem ada kasus Lippo, kemudian ada Uni Bank dan lain-lain. Sekarang yang mendukung ada Undang-Undang Nomor 5 tentang Akuntan Publik, ada Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995, kemudian ada Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004.

Menurut pandangan Asosiasi Emiten dan Asosiasi Efek Indonesia, regulasi apalagi untuk menambah sehingga tidak ada lagi kalau misalkan ada *moral hazard* yang dilakukan oleh emiten dan perusahaan efek misalkan. Sehingga mereka tidak ada ruang gerak lagi, ada regulasi apa? Kemudian tapi dengan tetap *market friendly* dan yang menggairahkan investor. Jadi tetap akuntabel. Jadi regulasi yang ada sekarang nih ada.. karena kalau saya melihat Undang-Undang Akuntan Publik itu kan sudah ada sanksi sekarang. Kalau dulu di hasil audit dari KAP dia bilang bagus kita kan kalau sebagai investor kita baca laporan keuangannya kita baca "oh ini bagus", tapi begitu dia pailit mau kita mau jual, sementara asetnya modalnya tidak mencukupi dijual, kita cuma dapat pegang kertas doang. Kira-kira regulasi apa yang Bapak butuhkan sebagai Asosiasi Emiten dan Asosiasi Efek Indonesia? Sehingga tidak ada lagi kita mendengar adanya *insider trading*, *financial engineering*, sehingga kita-kita ini sebagai investor merasa pasar modal adalah akuntabel.

Saya pikir itu Ketua.

Terimakasih. Kebetulan ada rapat fraksi saya mohon izin terlebih dahulu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terimakasih.

Selanjutnya kami persilakan Pak Hidayatullah. Ada Pak Hidayatullah? Oh sudah ada, kemudian siap-siap Pak Sihar.

F-PKS (H. HIDAYATULLAH, S.E.):

Terimakasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pada kita semua.

Pak Franky, Pak Oki dari AEI dan APEI, beserta seluruh teman-teman yang lain.

Saya hanya menambahkan pertanyaan untuk melengkapi pemahaman saya terhadap hal-hal yang terkait dengan kerja-kerja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di asosiasi ini.

Disebutkan bahwa apabila Omnibus Law dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik akan.. proyeksi pertumbuhan akan positif gitu. Jadi Bapak-Bapak saya menganggap Bapak-bapak sudah tahu isi Omnibus law itu sehingga dengan dijalkannya akan menyebabkan posisi pertumbuhan-pertumbuhan industrinya akan positif. Tapi kami yang akan membahas ini perlu kira-kira apa itu poin-poinnya karena pasti nanti dalam pembahasannya akan ada tarik menarik antara semua stakeholder di bangsa ini. Tidak hanya Bapak-Bapak dan Ibu dari AEI Dan APEI. Kalau bisa nanti disampaikan tertulis poin-poin apa yang diinginkan yang bisa menyebabkan pertumbuhan yang positif. Itu yang pertama.

Yang kedua disebutkan dari APEI itu ada kewajiban iuran tahunan dana perlindungan pemodal, apa ini maksudnya? Perlindungan pemodal, biar jelas. Kalau di dunia perbankan, yang dilindungi itu adalah dana pihak ketiga. Apabila banknya bermasalah *colla,ps*, maka dana pihak ketiga ditanggung ada iurannya. Nah di sini apa yang dimaksud dengan dana perlindungan modal? Lalu iurannya kira-kira berapa dan di mana dipungutnya. Lalu kalau terjadi apa-apa kemudian dana itu digunakan untuk apa?

Saya kira dua hal ini Ketua, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam, baik selanjutnya kami persilakan pak Sihar Sitorus kemudian kemudian siap-siap ini nggak ada ya bu Ela nggak ada. ini Bu Indah silakan pak Sihar.

F-PDIP (SIHAR P.H. SITORUS):

Terima kasih Pimpinan.

Seizin Pimpinan dan Anggota, teman-teman Anggota Komisi XI. Perkenalkan nama saya Sihar Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan dengan Nomor Anggota A-139, Daerah Pemilihan saya itu ada di daerah Sumatera Utara II.

Selamat sore kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang berasal dari yang mewakili Asosiasi Emiten Indonesia dan juga Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

Rekan-rekan saya sebelumnya sudah memberikan pertanyaan yang sangat banyak, saya mungkin coba bahas sependek mungkin gitu.

Kalau kita lihat pada awalnya terutama kalau kita inget-inget zaman kuliah dulu Pak, pasar modal Bursa Efek itu menjadi *proxy* atau bahkan merefleksikan kondisi makro. Tapi kalau kita melihat kejadian belakangan ini, terutama dengan maraknya Jiwasraya, Bumiputera dan yang lain-lain kok jadinya agak-agak jauh gitu rasanya, meskipun ini perlu kita lihat lagi dari data mungkin statistik ya. Jadi pertanyaan saya seperti ini sih atau mungkin masukan dari Bapak Ibu sekalian, lebih tepatnya masukkan kalau *rumours* di pasar gitu ya *how deep is this problem?*, gitu. Atau kita balik sebenarnya *opportunity* nya ada di mana sih dengan kejadian seperti Jiwasraya, Bumiputera, dan yang lain-lainnya. Mungkin ini juga karena kita sedang memikirkan bagaimana cari solusi dan kita juga sedang mengukur sebenarnya seberapa dalam *damage* yang udah terjadi ini sehingga kita bisa memikirkan solusi terbaik.

Kemudian tadi Pak Profesor Hendrawan mengangkat istilah detoksifikasi, sementara kita di pasar modal ada *delisting* dan *go private*. Kira-kira kalau melihat kejadian kejadian yang ada sekarang ini tentu Bapak Ibu sekalian yang lebih paham mana mana emiten yang yang bergerak berdasarkan fundamental, mana yang bergerak berdasarkan technical atau *rumours*, mana yang *combo* kedua-duanya. Apabila ini *fair* nggak kalau ada suatu aturan peraturan yang dianggap seperti *force delisting* atau *force go private* gitu? Artinya tentunya mempertimbangkan kriteria-kriteria lainnya yang mungkin bisa kita pikirkan tentunya ini semuanya *by will*-nya mereka sendiri untuk *go private* dan mungkin *delisting* juga tidak mudah tetapi melihat kondisi yang ada sekarang di mana kekuatan fiskal kita sekarang *under pressure* sehingga kita juga untuk mencapai pertumbuhan yang agak-agak cepat itu juga mungkin membutuhkan pelaku-pelaku yang benar-benar memanfaatkan dana yang ada itu untuk mengembangkan usahanya. Jadi sebagai asosiasi mungkin ada pandangan nggak sih tentang misalnya itu tadi *delisting and go private* yang *self indious*-nya *self indiousnya delisting* atau *go private* mungkin istilah yang lebih pas dengan itu.

Terakhir adalah tadi saya tertarik dengan istilah yang diangkat oleh Pak Karman, *included but illiterate* gitu itu seolah-olah kasarnya kita ada sekumpulan teman berenam yang 5 mabok yang satu lagi nggak, gimana gitu atau kebalikannya 5 orang baik yang satu mabok gitu. Kira-kira kan *included but illiterate*. Jadi ini ada *question, philosophy question* yang harus kita angkat juga. Meskipun kita tahu *market* itu sangat kejam *has no mercy* antara *social responsibility* ya. Kalau kita *included* tapi yang lainnya *illiterate*, berarti ada beban *responsibility* yang harus kita angkat supaya mereka tidak menjadi

makanan empuk atas *the assymetric information* versus tadi itu *market behaviour* yang memang *has no mercy*.

Saya pikir itu aja dari saya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya kami silakan Bu Indah Kurnia. Bu Indah selanjutnya Bu Anis.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terimakasih Pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Komisi XI, dan seluruh Bapak Ibu Narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini dari APEI dan dari AEI.

Saya Indah Kurnia, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan saya Jawa Timur I, yaitu Surabaya dan Sidoarjo.

Kawan-kawan telah menyampaikan hal-hal yang sangat baik khususnya tentang Jiwasraya, karena memang terus terang saya ingin mengkonfirmasi saja apakah Bapak Ibu ini hadir di Komisi XI ada yang baru pertama kali ya? Ya Pak? Kami pun juga merasa sepertinya berjumpa dengan AEI dan APEI ini baru pertama kali. Saya ini adalah periode yang ketiga Bapak Ibu sekalian tentu kenapa ini saya sampaikan karena begitu pentingnya peran Bapak Ibu sekalian sehingga pada saat kasus Jiwasraya, terus kemudian ada Bumiputera, kemudian ada ASABRI dan lain sebagainya tentang industri jasa keuangan yang ada ini, ini membuat kita memerlukan informasi dari berbagai pihak. Informasi tentunya yang valid dan akurat untuk memperkaya kami di dalam melakukan pembahasan dan mencari solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Sebenarnya kita juga menyadari bahwa peran pasar modal di dalam menyediakan likuiditas itu sangat strategis sekali. Kita tahu saat ini nilai kapitalisasinya sudah mencapai 7.000 triliun. Sementara perbankan yang sekian lama beroperasi juga pasti tercapainya di bawah itu sekitar 5.000 atau 6.000 triliun tidak sampai ya. 5.000 mungkin sekitar ya Prof ya perbankan. Itu sangat menjawab tentang kebutuhan likuiditas kita. Kita tahu bahwa untuk pembiayaan nasional itu tersisa dari perbankan itu hanya sekitar 4,5% saja likuiditasnya karena sudah tercapai LDR nasional itu 95 sampai 96%. Maka sebenarnya pasar modal yang tadi disampaikan bahwa tingkat literasi keuangan kita masih kecil. Saat ini OJK dianggap berhasil meningkatkan literasi keuangan lebih dari target yang ditetapkan 35%, mereka mencapai 36%. Meskipun inklusinya sudah mencapai 76%.

Nah di tengah situasi yang seperti itu, peran dan fungsi dan saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalian jadi pengurus APEI dan AEI ini tidak mudah ini adalah pahlawan-pahlawan yang mau bekerja *pro bono* pak ya *pro bono* meskipun ada rezeki, tetapi rezekinya tentu immaterial, tidak materi tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa berkontribusi kepada industri khususnya pasar modal, karena di dalam misinya itu jelas AEI adalah mengembangkan pasar modal agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi

pilar perekonomian nasional. Jadi pilar jadi penyangga menjadi kekuatan bangsa kita tapi dalam hal perekonomian.

Nah kira-kira dari *angle* yang berbeda, meskipun kita tahu kalau tentang Jiwasraya itu sudah lewat, udah terjadi tadi Pak Rudi dengan eksplisit menyampaikan saham-saham gorengan. Nah hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian saya hanya ingin mengambil kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk tindakan preventif agar ke depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti jiwasraya dan lain sebagainya. Sudah tingkat literasinya rendah, pemahaman tentang pasar modal itu juga belum begitu *ngeh*, mungkin kalau dilakukan kalau *ngeh* itu artinya paham kalau dilakukan *fit and proper test* dalam ruangan ini pun mungkin di antara kami ini masih banyak yang tidak paham Pak tentang bagaimana itu sih pasar modal itu mendapatkan *gain* yang baik. Kesempatan untuk bisa berbisnis dengan sehat dan mendapatkan *gain* yang bagus itu kan nggak paham di antara kami. Mungkin diantara kami juga ada yang belum sama sekali satu pun memiliki saham, tidak tercatat dimanapun kami memiliki saham, tidak bisa membeli apapun, karena memang kita pengetahuan kita tentang itu minim. Di tengah tingkat literasi yang rendah sementara kita tahu betapa strategisnya dana yang terkumpul di pasar modal untuk dipakai untuk membangun negeri ini. Nah ini pengurus semuanya APEI dan yang lain-lain kontribusi apa yang disiapkan agar hal-hal yang menimpa atau kasus-kasus.. yang bahkan ada salah satu menteri di ruangan yang sama menyampaikan kasus Jiwasraya ini merupakan kejahatan yang *terorganize*. Benar-benar *diorganize* secara sempurna oleh para pelaku. Tentu saja bukan pelaku yang ecek-ecek karena mampu melakukan tindakan dalam kurun waktu yang lama, dalam jumlah yang begitu signifikan besar dan saat ini membuat semuanya menjadi menderita. Terutama kami yang disebut sebagai wakil rakyat, bagaimana kami berjumpa dengan para investor dan menanyakan hak mereka untuk melakukan klaim.

Kalau yang dalam periode *saving plan* yang mendapatkan *gain* lebih tinggi itu kita masih nggak papa lah jawabnya enak ya karena itu *high risk, high gain*, itu konsekuensi dari kamu mendapatkan *gain* yang tinggi, tapi bagaimana dengan para pensiunan yang menggantungkan hidupnya ini setelah pensiun mendapatkan sesuatu yang *di-invest* sekian lama dengan *promise* dengan harapan dengan janji bahwa 25 tahun ke depan kamu mendapatkan seperti ini untuk *sangu urip* sisa hidup, untuk *sangu* mereka tidak menamatkan Bapak Ibu sekalian dan kami yang menjadi wakil rakyat yang tiap hari bergaul dengan mereka yang sekarang berubah nama dari teman menjadi konstituen itu kami repot menjawabnya, susah menjawabnya.

Nah itu sudah terjadi, kita semua sedang mencoba untuk mencari solusi memberikan jawaban dan solusi yang terbaik bagi seluruh pihak yang terkait terutama orientasi kita tentu kepada para investor, para customers, para nasabah, rakyatlah. Nah apa yang kira-kira bisa dipersiapkan oleh kawan-kawan APEI AEI untuk meningkatkan literasi keuangan, tetapi bukan hanya itu saja, tetapi memberikan rasa nyaman dan aman, memberikan sanksi sosial kepada anggota APEI dan AEI yang tidak *proper* menjalankan bisnisnya, yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan efek atau dampak kepada industri, kepada bangsa dan negara kita. Karena kan diharapkan ini yang namanya AEI ini menjadi pilar perekonomian nasional. Nah pilar ini harus kokoh. Saya menuntut agar visi yang ditulis di sini ini, bisa benar-benar diterapkan dalam perilaku berorganisasi sehari-hari yang berdampak

kepada bukan hanya peningkatan inklusi keuangan, tetapi lebih daripada itu adalah literasi keuangan.

Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terimakasih.

Jadi kita masih ada waktu 5, 6 menit masih ada 3 penanya, kemudian jawaban 15 menit, kesimpulan 5 menit.

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Ketua, daftar. Sebentar aja.

KETUA RAPAT:

Oiya Pak Sarmuji ya terakhir ya.

Jadi tiga tiga ini coba dipercepat Bu Anis kemudian Pak Sarmudji, setelah itu Bu Vera dan Pak Misbakhun.

Silakan Bu Anis, kalau bisa disingkat aja Bu ya.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anis Byarwati, Fraksi PKS dari Dapil Jakarta I, Jakarta Timur.

Iya ini menarik tadi saya ikut mendukung teman-teman yang bertanya tentang persoalan Jiwasraya, karena memang persoalan pasar modal di Jiwasraya ini kan sangat mengemuka menjadi penyebab salah satu gagal bayarnya Jiwasraya.

Kemudian yang kedua, tapi kan nanti kan dijawabnya nanti begitu ya. Yang kedua, ini sejak awal 2019 itu ada 48 emiten baru yang *listing* di BEI betul Pak ya? **..(rekaman terputus)**.. kerugian hingga 35,4% persen, ini benar Pak ya? Nah ini kan memperlihatkan ada *gap* antara saham yang *auto reject* dan ada yang turun, kemudian masalah distribusi pada saat melakukan IPO. Nah ini bagaimana APEI melihat kondisi ini?

Nah kemudian yang kedua, saya melihat juga ada beberapa keinginan Terpendam dari APEI ini terhadap OJK ya, seperti ketika menjawab pertanyaan Komisi XI Nomor 3, ketika ditanya mohon jelaskan apakah keberadaan OJK sudah cukup membantu, ya kalau di AEI ini cukup membantu jawabannya. Hanya memang masih perlu ini ini ini begitu ya. Kalau di APEI ini lebih lebih benderang ini apa yang diminta. SDM OJK diharapkan bisa lebih *market oriented* dan memiliki *comercial mindset*, OJK hendaknya proaktif terhadap perkembangan pasar yang sangat dinamis dan cepat dan tanggap membuat peraturan yang pro bisnis, namun tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen yang baik.

Ini keinginan yang betul saya tangkap sangat gimana gitu terhadap OJK gitu ya. Nanti mungkin perlu kita catat ini Pak Dito, Pimpinan, karena ini memang sangat penting.

Kemudian juga kalau di AEI ini ada ketika ditanya pertanyaan tentang Undang-Undang yang berlaku sudah sesuai tidak dengan perkembangan? Ini dianggap sudah cukup tetapi ada masukan perlu dengan penyesuaian dan evaluasi di beberapa area seiring dengan perkembangan teknologi. Nah ini kami minta dijelaskan dengan lebih rinci. Ini menjawab pertanyaan Nomor 2 AEI, Nomor 2 ini kan ada kata-kata namun perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi di beberapa area seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat. Ini mohon dijelaskan areanya apa yang perlu dibenahi dari Undang-Undang yang sekarang? Ini penting karena kita perlu melihat dengan lebih detail apa yang dibutuhkan oleh AEI, sehingga nanti bisa di jembatani.

Kemudian tentang yang tadi ditanyain Pak Rudi rekan saya, sebaiknya memang OJK didanai oleh APBN bukan sektor industri. Ini juga menjadi masukan buat kita nih Pak Dito. Nah mereka menjawab bahwa sebaiknya OJK didanai oleh APBN bukan didanai, nah itu kita *highlight* di sini, karena memang sudah banyak keluhan juga ya pungutan-pungutan itu.

Nah kemudian ada hal menarik tentang lesunya pasar modal di Indonesia. Jadi pertumbuhan jumlah emiten perusahaan mencari dana di pasar modal kerja (suara tidak jelas) begitu ya masih rendah sampai saat ini masih rendah. Menteri Keuangan meminta 1.000 tapi pertumbuhannya sampai November itu 794 gitu ya. Hanya bertambah 53 emiten atau sekitar 7% dibanding tahun lalu. Ini tentu tantangan bagi baik AEI maupun APEI untuk bagaimana bisa meningkatkan minat masyarakat untuk di pasar modal. Ini sejalan dengan tadi tingkat literasi keuangan yang rendah, tingkat ini literasi keuangan yang yang rendah begitu ya menyebabkan ini sangat rendah juga pertumbuhan emiten.

Nah kemudian untuk perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia yang yang mereka *listing*nya di luar negeri begitu. Jadi bagaimana, apa yang akan dilakukan gitu oleh AEI maupun APEI untuk perusahaan asing beroperasi Indonesia untuk *go public*nya di pasar modal domestik gitu? Jadi perusahaan asing terutama berbasis sumber daya alam ini menikmati keuntungan besar Indonesia tapi *listing*nya di luar negeri gitu. Nah apakah ada strategi untuk bagaimana mereka bisa ditarik untuk *listing*nya di *go public*nya di dalam negeri sehingga *listing*nya di dalam negeri gitu.

Nah kemudian apakah ada biaya *listing* di Indonesia ini seperti apa? Nah ini yang apakah menjadi penghambat dari perusahaan-perusahaan kita yang enggan *listing* di sini ya dan mungkin perlu biaya *listing* itu berdasarkan aset bukan kapitalisasi saham.

Saya kira itu dulu Pimpinan.

Terima kasih banyak ya, mohon dijawab ya Bapak-Bapak yang terhormat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Silakan selanjutnya Pak sarmuji, siap-siap Bu Vera, setelah itu Pak Misbakhun.

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Makasih Ketua.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati,

Saya masih ada kaitanya dengan apa yang menimpa Jiwasraya terutama berkaitan dengan apa yang disebut sebagai saham gorengan. Goreng-menggoreng saham saya membaca sekilas, bahwa dalam konteks tertentu goreng-menggoreng itu sesuatu yang legal, karena di pasar saham itu ada istilahnya *beauty contest*. Tetapi goreng-menggoreng ini kan bisa sesuatu yang menyesatkan, karena sebenarnya apa yang terlihat di layar monitor pada waktu kita melihat pergerakan saham itu tidak mencerminkan performa yang sebenarnya. Nah saya ingin Bapak-Bapak memberikan opini pada kami sebenarnya dalam konteks dalam batasan mana *beauty contest* itu goreng menggoreng saham itu masih bisa ditolerir? Karena seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kami tadi itu, dampaknya itu bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada pasar. Apalagi Bapak-Bapak ini kan butuh meyakinkan para investor supaya mau menanamkan uangnya di pasar saham. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang tadi saya sampaikan tadi goreng menggoreng saham di luar batas kewajaran, tentu saja orang-orang yang punya uang itu itu sulit sekali untuk diajak percaya ke pasar saham. Apa yang sudah dilakukan sekian lama untuk menarik investasi ke pasar saham itu menjadi berantakan gara-gara munculnya goreng menggoreng saham. Dalam konteks apa sebenarnya *beauty contest*, goreng-menggoreng itu masih bisa di tolerir dan mana yang tidak bisa ditolerir. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga ingin mendengar pendapat Bapak-Bapak tentang apa yang terjadi di Jiwasraya dalam proses investasi. Seharusnya perusahaan asuransi walaupun dia memasang dananya di pasar saham, seharusnya dia berlaku sebagai investor. Artinya apa yang dilakukan itu adalah orientasinya yaitu jangka panjang, bukan sebagai *trader*. Tetapi kalau apa yang terjadi di Jiwasraya ini rasa-rasanya direktur investasi itu memperlakukan dirinya sendiri Jiwasraya itu sebagai *trader* sebagai orang yang mengambil keuntungan jangka pendek, karena itu yang dipilih adalah saham-saham yang bisa digoreng. Kalau dia sebagai investor harusnya dia pilih saham saham yang orientasinya jangka panjang berkinerja baik dan tidak tidak performa jangka pendek. Nah saya ingin Bapak-Bapak memberikan tanggapan sebenarnya apa yang terjadi di jiwasraya dalam konteks itu yang seharusnya dia berperan sebagai investor tapi dia berperilaku sebagai seorang *trader*.

Barangkali itu, terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terimakasih selanjutnya Bu Vera, siap-siap Pak Misbakhun.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Makasih Pimpinan,

Assalamu'alaikum warahmatullah barakatuh

Perkenalkan saya Vera Febyanthty dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, Kabupaten Karawang, Bekasi dan Purwakarta, Fraksi Partai Demokrat.

Hampir semua teman-teman yang ada sebelumnya itu menanyakan mengenai kasus yang saat ini sedang mencuat di publik itu berkaitan dengan Jiwasraya. Dan pada 8 November yang lalu saya sudah capek energi saya mengkritisi OJK pada saat itu. Namun itu tahun lalu 8 November, sekarang sekarang ini baru digulirkan oleh teman-teman dari DPR maupun dari beberapa tokoh-tokoh yang muncul di media. Kasus Jiwasraya ini sebetulnya adalah peran otoritas yang pengawasannya sangat lemah, sangat lemah yang memang pada saat kita merubah melakukan perubahan Undang-Undang membuat Undang-Undang OJK kita meminta OJK itu menjadi seperti satu badan yang komprehensif mengawasi sampai melakukan penyidikan dan sebagai fungsi regulator. Namun memang kenyataannya OJK kita lihat hasilnya seperti ini dan sekarang sudah banyak orang mengkritisi.

Seiring dengan adanya usulan saya terima kasih Ketua untuk dilakukan perubahan Undang-Undang OJK, saya yang pertama kali mengusulkan, dan sudah masuk dalam prolegnas pada saat itu, agar dimasukkan fungsi ataupun ada satu peran badan pengawas OJK atau apapun namanya seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain. Artinya berharap ketika ini lahir, tidak ada lagi praktek-praktek yang terjadi sekarang ini yang merugikan negara. Nah tentunya berkaitan dengan fungsi ataupun rencana perubahan Undang-Undang OJK, momen pada kesempatan sore hari ini kita juga tadi sudah mendapatkan masukan juga dari asosiasi, para asosiasi bahwa perlunya OJK itu dibiayai oleh APBN. Saya yang pertama kali teriak bahwa OJK harus dibiayai oleh APBN pada tanggal 8 November 2019 yang lalu. Karena ketika di biayai oleh APBN tidak ada lagi praktek-praktek seperti ini, mereka memungut iuran registrasi dan juga segala bentuk rencana perbankan, rencana bisnis bank, rencana bisnis perusahaan itu semua di satu atap OJK. Artinya kita memang meminta kepada OJK untuk dikembalikan lagi fungsinya, marwahnya dan meminta supaya segala anggaran mereka itu dibiayai oleh APBN, sudah. Ketika biaya APBN tidak ada lagi praktek-praktek tersebut.

Pada saat kita membahas penerimaan OJK itu tidak terlihat secara nyata berapa denda di atas iuran, berapa denda di atas registrasi dan sudah terlalu banyak. Ini bukan pelaku emiten saja ataupun asosiasi yang melakukan ini. Para *lawyer* pun itu juga mengalami hal yang sama, berapa ratus ribu *lawyer* di Indonesia itu yang dipungut oleh OJK yang berkaitan khususnya mereka menangani perdagangan atau sektor keuangan. Jadi kami mohon kepada teman-teman nanti pada forum yang berbeda, mungkin bukan pada masa sidang ini karena kita masa sidang ini sedang membahas mengenai akan kita

bahas mengenai Omnibus Law untuk masa sidang berikutnya kita akan panggil tersendiri untuk mendapatkan masukan. Jadi mohon nanti disampaikan kepada kami untuk pada momen yang berbeda, khusus berkaitan dengan OJK. Itu memang kita punya semangat Pak untuk melakukan perubahan di dalam OJK, karena memang OJK ini sudah mempunyai kekuatan dan sebagai KPK nya sektor keuangan. Jadi sangat menakutkan.

Dan yang kedua, berkaitan mengenai kasus Jiwasraya, kita tahu tadi ada teman-teman mengatakan *auto reject* dan lain-lainnya. Ketika saham ini sudah mulai IPO harga ini melambung tinggi. Sehingga ketika kita beli *secondary market*nya barangnya nggak ada. Itu bisa gampang terjadi anjlok. Itu dari zaman dulu sudah seperti itu. Kita tidak bisa menghalangi. Artinya bahwa di sini peran OJK lagi-lagi harus dikasih stempel atau dikasih tato *blacklist* dan ini yang kejadian di Asuransi Jiwasraya pelakunya juga sama di Asabri, Pimpinan. Sama barang orang ini. Begitu luasnya dia bisa merugikan negara luar biasa. Bayangkan Negara Republik Indonesia bisa hancur, bisa runtuh hanya karena pelaku orang yang sama dengan manajer investasi yang sama. Nah saya berharap di teman-teman asosiasi emiten dan asosiasi perusahaan efek juga memberikan peraturan yang sama walaupun sebagai bukan fungsi regulator tapi ketika mereka masuk sebagai anggota, mereka harus ada mengikuti tahapan-tahapan seperti itu. Jadi ketika mereka sudah dianggap tidak layak, tidak boleh lagi langsung dikeluarkan sebelum dapat teguran dari OJK. Pelaku-pelaku ini kan teman-teman kita semua. Kita tahu siapa, mungkin kita sama-sama aja orangnya itu itu aja yang diperdagangkan ini orangnya itu saja manajer investasi. Dia bisa merusak. Dulu juga saya dengar juga untuk Bank Muamalat orangnya juga sama-sama juga di bungkus aja berbeda perusahaannya.

Nah ini lah yang yang kita kritisi akhir-akhir ini berkaitan dengan manajer investasi yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Saya berharap dengan pertemuan rapat sore hari ini peraturan-peraturan yang ada di dalam asosiasi ini harus memasuki unsur tersebut, agar mereka juga diberikan.. sulit untuk menjadi anggota asosiasi, diberikan apa yang sangat ketat dalam rekrutmen mereka dan artinya kita berharap ke depannya tidak ada lagi.

Nah yang ke khusus mengenai tadi juga dari teman-teman dari asosiasi perusahaan efek mengatakan prosedural untuk dalam rangka kita meningkatkan apa namanya untuk perusahaan daerah. Ada rencana OJK akan mengeluarkan obligasi untuk BUMD. Tapi ini masih baru wacana, yang sudah siap itu rencananya Jawa Barat ya. Kita tidak kita belum ada kesepakatan untuk mendukung apa saja karena ini masih baru karena kita tidak mau ini sama lagi nanti. Akhirnya daerah lagi yang dibebani hal-hal seperti ini.

Nah tolong teman-teman untuk dikaji kembali kira-kira apakah ini layak perusahaan-perusahaan daerah untuk ditarik dan *dilisting* seperti apa. Karena memang kami belum tidak menemukan sangat-sangat-sangat apa ya akan berdampak luar biasa terhadap daerah, siapa yang akan terbebani ke depan kalau mereka itu anjlok seperti itu.

Yang terakhir dari saya adalah mengenai ketika IPO apakah mendapat 1 perusahaan yang akan di IPO kan apakah mendapat jaminan atau akan mendapatkan jaminan bahwa *return of profit*nya itu bagus. Tidak semua perusahaan yang IPO itu mendapat jaminan itu. Nah itu gimana cara mengontrolnya? Ketika ini perusahaan sudah IPO terus dia *return of profit*nya

negatif atau positif kan hanya dalam jangka *certain* tertentu *current* periode tertentu. Nah ini bagaimana cara pengaturannya?

Dan yang menjadi apa namanya yang menjadi kritis saya pada saat itu adalah ketika penggabungan Bapepam-LK dengan OJK, ini kan orangnya sama aja nih pindah-pindah aja. Pelakunya sama-sama aja. Dulu zaman Fuad Ramani pindah, zamannya Pak Darmin ya itu mereka sekarang sudah naik jadi Eselon I walaupun mereka PNS. Nah ini di OJK sendiri sistem perekrutannya yang di OJK yang baru ini sangat tidak jelas. Apakah mereka PNS, atau mereka pendelegasian itu nggak jelas jadi *knowledge* mereka itu sangat terbatas. Sehingga kita juga tidak berharap orang yang tidak ngerti memberikan literasi kepada pasar. Dia sendiri keterbatasan mereka. Jadi kami berharap dari asosiasi yang melakukan literasi tersebut, ambil alih. Karena OJK sendiri orangnya juga kita tahu, mereka itu seperti orang yang nakut-nakutin kalau datang ya kan, kalau *fintech* itu mau mendaftar kalau lewat mereka punya apa namanya konsultan, lancar, tapi kalau kita sendiri misalnya mau mengajukan itu bisa setahun, dulu bisa dua tahun lagi di *holding*.. di *hold*.

(rekaman tidak jelas)

Iya bukan saya, misalnya, misalnya saya nggak punya perusahaan *fintech* Pak misalnya. Jadi seperti itu gitu lho. Mereka melakukan segala sesuatu untuk melegalisasi atas *under* PO OJK, PO OJK. Ini ada lagi asosiasi *fintech*, kita panggil Pimpinan, nggak jelas ini. Undang-Undangnya nggak ada tiba-tiba ada asosiasi *fintech*. Bagaimana? Kita belum bikin Undang-Undang gitu loh.

Udah lagi ya saya nggak tahu peran untuk perusahaan itu ada di OJK untuk pembayaran sistem *fintech* pembayaran ada di BI atau kita kembalikan aja ke BI. Selama belum ada Undang-Undangnya, bebas praktek mereka lakukan dengan mengatasnamakan PO OJK yang di atas segala-galanya sebagai kitab suci mereka. Ini luar biasa. Saya agak gemes kalau ngomongin OJK, karena saya sudah “kenyang keramasin” mereka. Sudah kenyang saya. Jadi saya sangat kritis berbicara masalah OJK. Bolak balik saya memberikan kritikan yang luar biasa terhadap OJK. Jadi teman-teman ketika nanti kita bicara masalah segala apapun yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang OJK, terbuka saja, tapi rapatnya tertutup, nggak usah kuatir karena kita semua ini dilindungi.

Nah itu dari saya Pimpinan dan yang terakhir, bagi kami memang pertemuan ini saya 2.000 ada Pak Budi Arsa di situ ya kami sama-sama 2004, 2004, 2009, 2009, 2014 Pak Budi Arsa, Pak Budi Arsa tuh.

Saya baru pertama kali bicara atau bertemu dengan asosiasi emiten sama yang disampaikan Ibu Indah. Mungkin kita berikan apa-apa, secara reguler ya minimal setahun dua kali untuk menambahkan, memberikan masukan bagaimana perkembangan pasar, bagaimana mengenai regulasi, bagaimana dengan kondisi saat ini perekonomian Indonesia. Supaya kita diberikan masukan-masukan yang.. Bapak-Bapak ini kan pelaku pasar semua ya ya kan. Kita punya keterbatasan terhadap penyerapan atau memahami masalah hal-hal yang berupa teknis khususnya di pasar modal. Karna kami sendiri sudah terlalu banyak yang kami tangani di Komisi XI. Jadi kita berikan regular gitu lho rapat setahun dua kali itu sangat baik.

Saya kira itu saja dari saya Pimpinan, terima kasih selamat sore.

KETUA RAPAT:

Baik selanjutnya Pak Misbakhun silakan yang terakhir.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Makasih.

Pimpinan yang saya hormati, Pimpinan Komisi XI,
Anggota Komisi XI yang saya hormati,
Pak Franky selaku Ketua Asosiasi Emiten beserta pengurus ada Pak Iyan, Pak Bobby, Pak Budi Arsa, Pak Agus..
Kemudian dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua

Saya tadi juga sama Pak mengenai Jiwasraya yang sebenarnya yang paling banyak. Ini sebenarnya kasus Jiwasraya ini menjadi bahan perenungan kita bersama, bahwa seberapa jauh kita mengefektifkan asosiasi dalam mendukung perekonomian nasional Pak. Karena apa? Bursa ini kan paling banyak mendapatkan insentif Pak. Paling banyak. Emiten tarif pajaknya lebih rendah daripada yang biasanya, terhadap korporasi yang sama emiten kalau dia perusahaan Tbk dia mendapatkan *tax rate* yang berbeda. (suara tidak jelas) Ya 5% ya harus 40% kepemilikan di itunya. Dan ini kan juga salah satu insentif Pak ya.

Kemudian dari transaksi pun di Bursa kan dikenakan ini kan berbeda pengenaannya dan kemudian perusahaan saham pendiri juga mendapatkan fasilitas yang berbeda terhadap pengenaan taxation. Dan ini kan fasilitas ini yang diberikan dalam rangka untuk memberikan insentif dan memberikan daya dukung kepada perekonomian nasional. Nah tapi apa yang terjadi dengan kasus Jiwasraya ini? Ini akan menjadi bahan perenungan kita bersama karena apa pak? Setahu saya judi ini dilarang di Indonesia, tetapi jangan sampai bursa pasar modal kita itu menjadi *the another gambling rooms* di Indonesia. *The another gambling rooms* di Indonesia. Lah ini kan jadi itu. Karena apa? Kalau Soros mengatakan bahwa salah kalau kita mengatakan bahwa di situ ada spekulasi, tidak kita bisa memprediksi semuanya. Semua pasar itu bisa kita prediksi. Saya juga ingin menyatakan bahwa kita harus berbicara tentang fundamental korporasi, kita berbicara tentang fundamental pasarnya itu. Jangan sampai kemudian yang tidak mempunyai fundamental korporasi, kemudian hanya menguasai fundamental pasar saja dan kemudian bisa *drive* melakukan *cornering* apa yang terjadi dengan Jiwasraya ini kan itu Pak. Dan apa yang kemudian terjadi? Ya keterlibatan manajemen investasi dan sebagainya. Dan ini kan juga menjadi bahan perenungan pagi asosiasi seberapa kuat kontrolnya terhadap itu.

Dan termasuk kepada emiten jangan sampai sahamnya menjadi saham yang hanya kuat di fundamental pasar, tidak di fundamental korporasi. Hanya menjadi alat gorengan tapi tidak menjadi alat investasi ini. Ini kan juga jadi bahan perenungan lho Pak bagi Bapak sekalian itu. Jangan sampai dijadikan

fundamental gorengan tapi dijadikan alat goreng-menggoreng aja tapi tidak dijadikan investasi. Coba berbeda dengan orang yang megang Astra, megang Sampoerna, megang Gudang Garam, dia akan *long term* dia. Dia akan selalu mengatakan dan saham itu selalu *rare* selalu sedikit dan terbatas di pasar itu. Inilah kalau menurut saya menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Karena apa? Di sanalah *zero sum gain* itu berjalan. Karena apa? Keuntungan yang kita dapat akan menjadi sebuah *the another lose* bagi lawan tanding kita. Lha karena permainan yang *zero sum gain* inilah kalau menurut saya sementara pasar modal mempunyai nilai yang sangat strategis, likuiditas sangat longgar di sana. Aturan bisa kita mainkan dengan sangat baik kalau kita mengikuti regulasi di sana. Karena apa? Keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Dan kemudian kita tidak memberikan *return* seperti kita memberikan return kepada yang *fix* kepada perbankan. Lah menurut saya terutama kepada asosiasi emiten nih Pak, apalagi kemudian Omnibus law akan menurunkan *rate* yang lebih turun lagi kepada emiten nanti. Sudah diturunin, diturunin lagi ini nanti Pak dengan Omnibus law ini. Jangan sampai Pak kemudian pertanyaan kita ngapain kita kasih fasilitas orang mereka tidak membangun fundamental korporasi yang mereka bangun adalah fundamental pasarnya. Hanya menjadi alat goreng menggoreng aja, mencari likuiditas, mencari dana murah, dana segar dan dana murah dari masyarakat ya kan, lah ini apa yang yang akan menjadi pegangan kita untuk memperjuangkan Bapak-Bapak ini gitu. Sama kemudian mengenai aturan perpajakannya. Kalau perusahaan Asosiasi Perusahaan Efek tidak bisa menerbitkan manajemen investasi perusahaan perusahaan sekuritas yang ada di sana, apa yang akan bisa kita bela Pak? Gitu. Apa yang bisa kita lakukan karena apa untuk melakukan spekulasi kan yang melakukan temen-temen Bapak semua. Kita tahu kok. Temen-temen Bapak semua kok. Orangnya itu-itu juga. Ada kelompok solo lah, yang ini lah, geng solo ini itu. Kita udah terbuka aja gitu.

Lah untungnya sekarang Pak berbedanya sekarang Kejaksaan Agung mau melakukan tindakan yang penegakan yang lebih ketat. Mereka melakukan *cornering* seenaknya saja, otoritas tidak melakukan. Padahal dalam Undang-Undang Pasar Modal, *cornering* itu sudah melakukan sebuah tindak pidana tersendiri. Tapi apa yang terjadi? Kan tidak. Pengawasan yang lemah yang tadi yang dikatakan kalau iurannya dari anggota, mana berani mereka sama industrinya atau ya terjadi *hanky panky* antar mereka itu. Ada hanky pangky.

Nah di sinilah ada bahan renungan bagi kita semua kasus Jiwasraya ini jangan sampai yang terjadi. Pak kalau begini yang rugi adalah Bapak-Bapak juga karena apa *tax fire*-nya adalah Bapak-Bapak. Kalau negara melakukan *top-up* terhadap kerugian modal negara yang disertakan di sana, uangnya diambil dari Bapak-Bapak kok. Uangnya diambil dari Bapak-Bapak muter lagi Pak karena apa melalui PMN mekanismenya, PMN darimana, dari APBN APBN sumber penerimaannya darimana dari pajak. Kalau gak ya dari hutang ya Bapak-Bapak lagi yang bayar. Sementara industrinya tidak efektif ya kan, Bapak-Bapak lah yang menjadi beban. Lah menurut saya siklus ini yang harus Bapak-Bapak menjadi bahan perenungan. Kalau saya sih mengajaknya begitu. Merenungkan ini. Jangan sampai kita tidak bisa menertibkan eh kalau asosiasi emiten jangan sampai lah kita hanya saham kita jadi digoreng terus. MI juga begitu itu, karena apa mekanismenya *zero sum gain* tadi. Keuntungan Bapak-Bapak dari kerugian orang lain.

Lah ini menurut saya paling berharga ini adalah pelajaran Jiwasraya ini. Jiwasraya ini Pak, karena apa? Memainkan apalagi kemudian dananya berasal dari mana diantaranya dari Asabri dana pensiunnya tentara, polisi. Saya yakin ini Taspen juga akan sama kalau dibuka. Cuma karena Taspen ini belum ada yang mau ngomong. Taspen ini karena apa yang di *hold* sama kok yang dipegang sahamnya. Pelakunya juga sama kalau Asabri yang punya tentara dan polisi Taspen punya para ASN monopoli yang dia mainkan sama hampir sama. Lah inilah kalau menurut saya yang kita harus hati-hati karena di sana apa *linkage fun*-nya itu kan ..(**rekaman terputus**).. sementara kan kita kan tidak punya sistem penjaminan seperti di Jepang. LPS Jepang itu termasuk asuransi, termasuk di sekuritas ketika terjadi kasus Nomura pada tahun 83 mereka masih bisa mem-*bail out* oleh negara. Tapi kan ini kan tidak bisa terjadi. Nah ini lah Pak kalau menurut saya, mari kita sama-sama merenungkan, menertibkan barisan kita merapatkan barisan kita Pak, karena apa? Situasi 2019-2020 ini kan menjadi bahan perenungan kita bagaimana cara kita pelaku pasar bagaimana pasarnya dikuatkan, supaya mempunyai dampak terhadap perekonomian nasional. Karena apa Pak? Cerminan negara itu kuat atau tidak salah satu yang diukur adalah apa fundamental di pasar modalnya Pak. Tiba-tiba nilai indeks harga saham gabungan kita naik, termasuk Indonesia diukur bahwa investasi di pasar modal Indonesia paling menguntungkan. Lah ini kan menjadi salah ukur ekonomi makro kita. Tapi kalau kemudian yang terjadi adalah skandal yang satu ke skandal yang lain, orang-orang akan melihat bagaimana cara mereka menaikkan investasi itu. ternyata ya dari sistem goreng-menggoreng aja Pak. Jumlah emitennya tidak naik signifikan tetapi indeks harga sahamnya naiknya berlebihan gitu. Ini menunjukkan fundamental korporasi atau hanya sekedar sebuah mainan indeks aja. Lah ini yang menjadi bahan perenungan kita bersama, apalagi otoritasnya kita tahu itu kan ya.

Itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik terakhir ada tambahan dari Pak Gde Agung Rai..

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Agung Rai Pak, Bukan Pak Gde Rai Pak.

KETUA RAPAT:

(tertawa)

Sorry sorry sorry Pak, silakan Pak.

F-PDIP (I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, SE, MM):

Terimakasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati
Dari Asosiasi APEI maupun AEI, yang saya hormati Pak Frans Welirang,**
Sekarang gemukan dulu agak kurus ya Pak.
Sahabat saya yang di belakang itu Pak Budi Arsa,
Kok duduk di belakang? Ke samping sini ya Pak. Ini Pak dulu duduknya di sini berdekatan sama Ibu Vera ini.

Terimakasih Bapak Ibu sekalian,

Tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan, saya tidak ingin mengulang lagi apa yang sudah disampaikan. Cuma saya ada beberapa hal mungkin ingin pendapat dari asosiasi ini sehubungan dengan sudah jelas mungkin di antara anggota asosiasi ini melakukan pelanggaran atau melakukan permainan penggorengan istilah Pak Misbakhun. Nah adakah sebuah hal kode etik atautah tindakan yang akan dilakukan kalau kita sudah tahu atau sudah tahu bahwa salah satu anggota itu memainkan saham atau memainkan bahwa itu yang seperti tadi ada yang disampaikan oleh temen-temen, tiba-tiba naik 35%, kemudian dalam 1 bulan sudah turun lagi 35%. Apa tindakannya terhadap mereka-mereka? Yang selama ini kalau saya lihat masih saja bisa eksis. Sedangkan apa fungsi dari asosiasi ini? Apakah mereka dikeluarkan atautah diberikan sanksi apa atautah apa yang dilakukan terhadap mereka mereka yang sudah jelas? Di mana satu sisi kita berkeinginan agar dipercaya bursa saham di pasar modal kita. Sehingga masyarakat menjadi *minded* terhadap saham. Seperti di negara-negara lain, orang di *handphone* udah bisa memainkan saham, bisa ikut serta memainkan saham walaupun sekarang sudah mulai dikembangkan 100 ribu pun anak-anak mahasiswa sudah ikut serta di main saham. Nah ini jangan sampai ketika ini sudah berkembang, keinginan masyarakat, keinginan milenial inilah kita sebut milenial ya untuk ikut berpartisipasi dalam permainan di saham ini. Mohon ini buat sebuah tanggapan dari Bapak Ibu di asosiasi ini baik APEI maupun AEI untuk memperkuat negara kita melalui pasar saham ini di pasar modal. Sehingga kepercayaan itu ada goreng menggoreng maupun yang lainnya ini ada sebuah teguran atau mungkin sikap dari asosiasi ini. Dimana kami dengarkan Pimpinan asosiasi ini berputar dari situ ke situ. Nah ini bagaimana kalau terjadi di antara anggota ini dalam jadi Pimpinan yang melakukan penggorengan. Apa yang dilakukan dan bagaimana langkah ke depan danantisipasi.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terimakasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terimakasih Pak Agung Rai.

Demikianlah tadi Bapak-Bapak pendalaman pertanyaan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi XI DPR RI. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan tanggapan mungkin secara *highlight* saja karena nanti kemudian bisa masuk kesimpulan. Pertanyaan yang lain bisa dijawab secara tertulis.

Baik kami persilahkan Pak AEI, dulu pak Franky silakan.

KETUA AEI (FRANSISCUS WELIRANG):

Baik, terima kasih.

Yang mungkin akan berbicara saya, Pak Bobby, nanti Pak Hidayat, Syamsul Hidayat.

Saya hanya ingin meng menegaskan bahwa emiten-emiten itu sama dengan satu kuda pacu dan dibawa terbuka dari dia. Yang dia jual adalah sahamnya, sahamnya dijual naik dan turun nggak ada hubungannya dengan emiten. Karena emiten itu sudah mendapatkan uang dia menjalankan usaha. Saya kira itu, itu supaya *clear* terhadap hal itu. Nah kami membina emiten ini. Saya kira itu. Jadi kami juga bukan regulator. Regulator sudah jelas ada di OJK. Jadi saya kira itu yang ingin kami saya tegaskan.

Yang kedua, di emiten itu ada emiten keuangan, ada emiten properti, konsumsi tadi saya industri. Keuangan itu asuransi, bank, dan perusahaan *leasing* itu ada emiten, tapi di luar juga ada perusahaan keuangan yang non *public*. Dua dua publik dan non publik bayar iuran ke ojk. Dia menggunakan uang untuk pinjaman atau asuransi, tapi properties, dia dagangnya properties. Tambang, dia dagangnya bahan tambang, dia tidak dagang keuangan. Dia mengiur ke OJK. Kawannya yang bukan terbuka, tidak mengiur itu diskriminasi bagi kami. Walaupun uangnya kecil maksimum 300 juta. Tapi itu diskriminasi. Itu saja yang menjadi yang kami inginkan terhadap iuran, harusnya itu ditanggung oleh pemerintah. Saya kira itu.

Menyangkut Jiwasraya dan ada menyangkut Omnibus, sehingga Omnibus itu macam-macam. Nah Omnibus industri salah satu yang sangat penting bagi anggota kami ya. Jadi bukan Omnibus mungkin investasi dan lain sebagainya itu di sana, di pajak pasti itu. Jadi itu dua kalau AEI. Sedangkan investasi dan keuangan itu nggak ada urusan di AEI. Saya kira itu.

Nah mungkin mengenai Jiwasraya sedikit.. saya mau tambah *highlight* tadi disinggung mengenai aturan Undang-Undang, hanya satu yang saya tidak lihat, *insider trading*. Tidak ada peraturan di Indonesia terhadap *insider trading*. Yang memungkinkan mengakibatkan goreng-goreng dan sebagainya.

Itu saya ingin *highlight* saja satu. Mungkin selanjutnya saya bisa tinggalkan Pak Bobby bisa menggantikan.

WAKIL KETUA KAE (BOBBY):

Mohon ijin.

Pak Pimpinan yang terhormat beserta seluruh Anggota Dewan yang terhormat.

Saya mau singkat saja sambil *highlight* Pak, tapi kebetulan saya juga Wakil Ketua Tim Satgas Kadin untuk Omnibus law. Omnibus law ini hanya 2 Pak, satu Perpajakan, satu lagi Cipta Lapangan kerja. Jadi yang terkait dengan bursa saham dan sebagainya itu masuknya hanya di perpajakan. Tapi tadi Bapak ada lagi yang tempat Bapak-Bapak Dewan yang lain bilang bahwa ini apabila dimasukkan ke Omnibus law dan sebagainya masuknya dari perpajakan. Kalau yang lainnya adalah ke industri untuk menciptakan investasi.

Nah saya sekarang langsung bicara ke Jiwasraya Pak. Jadi saya mau coba menjelaskan dulu apa itu pasar modal, pasar modal adalah tempat

investor menaruh uang modal kepada perusahaan yang tercatat di pasar modal. Nah Indonesia ini pasar modal yang ikut serta itu masih minim sekali dibandingkan negara-negara lain yang sudah maju dan besar *market*nya. Jadi ketertarikan perusahaan masuk ke pasar modal juga terbatas Pak. Kenapa? Kita telanjang. Begitu masuk siapapun bisa buka buku kita. Kenapa sekarang misalnya Gojek 10 milyar dollar perusahaan, nggak mau masuk Pak pasar modal Pak. Coba dibuka, itu perusahaan nggak pernah untung. Valuasinya bisa 10 milyar dolar.

Jadi balik lagi yang namanya masuk pasar modal ini juga nggak gampang, pemerintah menyuruh 1.000 emiten masuk. Nah jadi juga hati-hati menambah peraturan-peraturan. Tetapi mengakibatkan justru orang tidak mau masuk pasar modal. Nah kemudian siapa yang taruh di pasar modal? Dua investor. 1 lokal 1 asing. nah investor sendiri juga terbagi 2 Pak, begitu dia masuk tujuannya apa. Dia investasi atau spekulasi. Ya jadi kalau masuk spekulasi jangan bicara sama asosiasi emiten Pak. Kalau bicara investasi ya itulah yang menjadi anggota-anggota kita nah perusahaannya.

Begitu masuk investasi, 2 yang dicari Pak, hasil jual beli dia waktu *invest* 100 rupiah setelah 2 tahun valuasi perusahaan naik jadi 200 rupiah itu nggak salah. Bisa dicapai dalam waktu dekat, bisa dicapai 10 tahun, tapi dia jual beli. Yang satu lagi adalah deviden, mau sahamnya naik turun, deviden tetep jalan Pak kalau perusahaannya untung. Nah balik lagi semuanya perusahaan itu paling gampang ambil *bluechip*. Jadi kalau investor-investor ini itu nggak ngerti apa-apa awalnya Pak, tapi dia tentunya menaruh uang ini kan bisa di bank, bisa di manajer investasi.

Nah saya masuk ke Jiwasraya sekarang. Jiwasraya itu adalah saya itu adalah uang nasabah di dalam. Nasabah asuransi bukan nasabah saham. Dia nggak tahu nih duit ini di *manage* sama Jiwasraya jadi apa. Kemudian di Jiwasraya tentu harus membayar premi, caranya apa ya didayagunakan uang ini ada deposito, ada beli surat berharga, ada yang lebih berisiko, tetapi juga namanya *high risk, high return* kalau di *manage* dengan benar. Jadilah dia manajer investasi untuk duitnya nasabah. Nah yang saya mau sedikit masuk tadi di tanya dampaknya gimana, nggak ada yang tahu Pak. Ini baru kalau saya bilang “nila segelas, bukan setitik, sebelanga udah rusak”. Saya takutnya itu besar sekali Pak, terus terang. Ini baru 2 lho, tadi Pak Misbakhun bilang Taspen dan sebagainya. Tapi selalu Indonesia itu kalau rugi baru ribut, pas untungnya mah nggak pernah ribut, nggak Pak. Mereka juga pernah menikmati masa-masa untung. Jadi balik lagi si manajer investasi inilah paling bertanggung jawab siapa ya itulah yang mengelola keuangan itu. Jadi bukan salah Jiwasrayanya, bukan salah nasabahnya, bukan salah emitennya.

Nah sekarang dia berkolaborasi dengan siapa, nah ini *market maker* Pak. *Market maker* itu bisa dari *market*, bisa dari si emiten sendiri. Caranya gimana? Paling gampang kalau nggak likuid, Bapak bisa bayangkan kalau 40% saham likuid Pak, nggak mungkin dimainin Pak. Terlalu besar biayanya dan terlalu besar risikonya. Bapak baru naik 5 rupiah, orang udah guyur-guyuran, tapi kalau yang beredar cuma 1%, bulan Oktober harga 300, bulan Desember tutup buku biar perusahaannya bagus, direksi dapat bonus, dinaikin 3.000, 10 kali, gampang Pak. Ya saya nggak mau cara itu. *Market maker* di Indonesia kalau nggak ada *market*, kayak restoran Pak nggak ada rasanya Pak.

Nah jadi Ibu-Ibu yang nggak tahu ini denger temennya bilang eh *invest* di sini dapat ini lho untungnya sekian, itu besok masuk Pak. Nah dia nggak

pernah lihat data, dia nggak pernah lihat apa-apa, dia cuman ikut temennya ini makan *rumours*. Jadi yang namanya *market* terbuka ini apakah dia lihat data, apakah dia lihat apa *fund manager* ada di (...) segala macam itu masing-masing banyak sekali jenis investor. Ada yang cuman *rumours*. Yang kasihan ini *rumours*, orang Indonesia seneng *rumours* Pak. Jadi kalau mau aman, taruh di *bluechip* aja udah. Nah kenapa dia mesti masuk perusahaan yang *high risk* dan nggak likuid. Nah berarti kan manajer investasinya.

Jadi kalau Bapak mau kejar di sana Pak, siapa yang ngambil keputusan di situ ya. Itu kan Pak ada yang *join* Pak, saya ambil di bawah, jual di atas ya. Oke, jadi kalau ditanya dampaknya besar. Jadi Bapak nggak usah khawatir sekarang ada peraturan di OJK ini sudah agak terlalu banyak juga Pak. Kadang-kadang kita juga males jadi perusahaan publik. Tadi salah satu Anggota Dewan bilang ada mekanisme *delisting* apa tidak perusahaan-perusahaan yang begini. Ada Pak, tapi kompensasinya apa pemegang saham publik. Itu harus ada yang tanggungjawab, yaitu pada saat *delisting* mesti di *buy back*. Jadi mekanisme semua itu sudah ada. Nah cuman tinggal itu ada mekanisme panjang lah kalau diurut kan, ya ada syarat-syaratnya. Tapi balik lagi adalah begitu masuk publik, kita telanjang, kita terbuka, data keluar dikontrol sama auditor luar, OJK, dan sebagainya. Coba Bapak lihat datanya Gojek untung berapa kan nggak bisa. Padahal valuasinya 10 milyar dolar.

Nah yang penting adalah investor kita itu mesti terdidik. Kalau nggak terdidik, tinggal dicari manajer investasi dari APEI itu pasti tahu banyak mana yang *bluechip* juga. Nah jadi balik lagi Pak kalau kita kalau Bapak nanya mengenai Jiwasraya penjelasan dari kami, pertama Jiwasraya ini bukan perusahaan publik, tapi saham yang dibelinya perusahaan publik. Dan itu murni Pak itu memang permainan. Kenapa permainan? Ya Bapak bisa lihat sahamnya aja masa dalam 3 bulan bisa naik 10 kali, pasti permainan. Cuma caranya main gimana? Pasti nggak likuid. Hanya kami tidak bisa membuktikan. Kita hanya memberikan informasi selaku sesama emiten. Ya jadi.. (rekaman tidak jelas) kenapa? (tertawa) Cuma bis kota kami lewat jalur Pak. Nah ada yang tidak lewat jalur.

KETUA RAPAT:

Pak Bobby, Pak Bobby sebentar interupsi sebentar. Ini penting loh informasi karena kami akan membuat panja ini.

Jadi gini Pak Bobby, produk yang dikeluarkan oleh Jiwasraya ini kan *JS plan* eh *JS Saving Plan*, oke. Itu produk kan harus disetujui oleh OJK. Oke. Pertama, produk ini kan sudah disetujui kan, kemudian kok sampai terjadi seperti ini, ini kira-kira gimana? Pada waktu perubahan harga kan pertama kenaikan 20% sehari kan yang gak boleh ya tapi tidak (suara tidak jelas)

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Itu ada *auto reject* Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ada *auto reject* ya.

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

(suara tidak jelas)

Oh tergantung besarnya *rangeny*a.

KETUA RAPAT:

Nah ini kok bisa terjadi sampai segini parah, segini besar ini kira-kira gimana kira-kira ya? Coba.

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Pak, mungkin kalau forumnya rasanya nanti di luar AEI ini Pak. Saya siaplah jadi ini Bapak apa namanya *adviser*. Tapi kira-kira Pak mekanismenya itu ada mekanisme *auto reject* kalau naik itu OJK atau bursa memberhentikan perdagangan dan dia akan mengirim surat langsung. Oke, jelaskan kenapa terjadi kenaikan yang tidak biasa, ya signifikan apakah ada *corporate action* atau sebagainya itu ada proses Pak, sampai di buka lagi. Kalau tidak bisa jelas tidak akan dibuka oleh bursa. Jadi mekanisme itu ada. Nah tinggal dia menjelaskannya harusnya semua data kan jelas. Oh ini karena ada misalnya batu bara di dunia naik Pak, jadi ada yang memang bisa dikontrol apa namanya parameter, ada yang tidak bisa dikontrol tiba-tiba Trump apa nyerang Iran. Itu emas sama minyak langsung naik Pak. Siapa yang bisa control gitu, nah itu orang yang investasi di situ bisa untung. Itu bukan *market maker* Pak, *it's real* gitu itu *global market*.

Nah jadi balik lagi pasti akan ditanya. Nah cuma kalau saya lihat permainannya Pak adalah dia bisa investasi di luar wewenang. Misalnya 1 saham itu ada batasan jenisnya, tiba-tiba semua duit 6 triliun masuk ke arwana apa apa itu. Ya jadi kan nggak mungkin itu harusnya pada saat itu ada diversifikasi risiko. Ada aturannya juga boleh maksimum satu ini berapa-berapa APEI bisa menjelaskan itu dari pialang. Cuma itu bukan ini kami, jadi itu nanti ada regulasi tapi kalau di luar saya bisa jelasin. Nah tapi intinya Pak ini banyak sekali yang dilanggar, dan kalau mau siap-siap berani nggak Indonesia buka dari cuman 2 tadi. Resiko ada Pak, kabur semua Pak kalau *trust* sudah hilang kabur semua. Tapi sekarang berani nggak kita buka? Waduh Pak, banyak Pak, saya kan juga pernah ikut temen denger gitu kan di sini taruh, di sana taruh bisa beli ini, bisa beli itu, tapi biasa. Jadi goreng-gorengan itu bukan hal yang salah tetapi kalau investornya pinter ngapain beli goreng-gorengan, beli aja *bluechip*. Kalau nggak dia cari siapa Mandiri Sekuritas atau Danareksa apa danareksa. Ya nggak danareksa yang manajer investasi. Ya minimum dia kan punya BUMN. Jadi bisa diinikan, tapi kalau banyak yang tukang goreng di pasar juga ada.

Nah orang Indonesia itu senengannya yang itu Pak, bukan yang *bluechip*, *bluechip* berapa sih untungnya. Ya kan Pak. Beli Indofood saya nggak seneng Pak, devidennya gede, tapi nggak naik turun Pak. Saya main di luar negeri, pribadi taruh di Singapur. 1 tahun tuh bisa US dollar tahun 2019 rata-rata orang Singapur 25% Pak USDollar. Ngapain saya taruh kalau di Indonesia deposito cuman 2% gitu, kan 1 tahun bisa 10 tahun saya bisa lebih untung USDollar. Tapi saya taruh juga di Cina, hancur Pak gara-gara Trump. Bisa

control? Nggak bisa. Itu bukan jadi nggak ada yang namanya *control market*. *Market* itu open, nah semakin besar *market*, semakin open. Nah balik lagi di situ yang mau bisa dikontrol adalah yang tentunya *full control* Pak, jadi yang di pasar cuma 2-3%. Ini cuman untuk ini, nah balik lagi ya.

F-PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Interupsi sedikit Pak.

Soal Jiwasraya tadi Pak, karena BPK ini sudah mengatakan ada indikasi sistemik Pak. Tadi Bapak kan melihat dari yang Bapak paparkan tapi soal Jiwasraya itu kalau kita mau buka-bukaan tadi ini kan luar biasa Bapak bilangnyanya. Nah Apakah Bapak membenarkan apa yang menjadi indikasi dari BPK tadi?

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Pak, kalau sistemik di sistemik di sistem kita kayaknya nggak ya. OJK segala macam, semua sistem sudah bagus. Sistemiknya itu apa hanya 2 itu? Apakah dana pensiun Pertamina, dana pensiun BNI segala macam itu kan triliunan juga, Jamsostek dulu ya. Sekarang Jamsostek udah nggak bisa Pak *invest* begitu. Nah batasan-batasan itu peraturannya udah ada Pak, asuransi itu hanya boleh di sekian di saham. Misalnya dana pensiun hanya boleh 20% apa berapa gitu ya pak ya, saya kurang jelas itu tapi ada batasan. Nah ini yang dilanggar, dilanggar. Dan tidak boleh satu portofolio Pak, jadi itu musti mungkin resikonya segini ada yang *bluechip* ada itu kombinasi.

Jadi kalau Bapak tanya itu itu banyak sekali dilanggar, biar auditnya selesai dulu Pak, karena kalau kita ngomong terlalu cepet gak jelas malah mukul kita balik. Dia pasti Pak yang pemain di situ saya nggak nyebut namanya itu orang-orang jago Pak. Dia udah siap, Bapak kejar nggak akan dapet. 2018 udah *gone* dia, udah selesai.

Jadi Bu, Bu Vera kan nulis surat tuh mengenai siapa yang bertanggungjawab, bukan pemerintah Pak, *fund manajemnya*. Pemerintah udah ada mekanismenya cuma itu semua tinggal apakah mau nggak diitu. Cuman ini kalau mau dibuka rame Pak, jadi bukan sistemik itu banyak. Ya itu saya dari selaku tapi bukan asosiasi emiten ya jadi saya balik lagi, investor itu apa namanya yang untuk *fund manager* ini kita itu bukan perusahaan publik tapi perusahaan publiknya memang tidak likuid jadi dia tidak terkontrol.

Ini yang terakhir itu mungkin Pak.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Interupsi sedikit

Tadi disebut nama Vera nih Pak Bobby, Mas Bobby.

KETUA RAPAT:

Bu Vera dulu setelah itu Pak Dolfie, silakan.

F-PD (Hj. VERA FEBYANTHY, M.Si.):

Saya menulis *press release* pada saat itu tanggal 24 Januari eh 24 Desember menjelang kita mau reses terkait mengenai keputusan Fraksi Partai Demokrat meminta di pansus kan pada saat itu. Dan juga kami meminta rapat gabungan. Saya tidak mengatakan di situ pemerintah, tapi pemerintah harus bertanggung jawab karena di situ BUMN bagaimana bila seluruh BUMN dan komisarisnya tidak bisa memantau ke mana itu *placementnya*, investasi itu dilakukan. Itu satu Mas Bobby.

Yang kedua, OJK itu adalah bagian dari pemerintah walaupun dia bukan pemerintah, dia adalah bagian dari pemerintahan harusnya ikut bertanggung jawab dan mengawasi. Jadi saya melihat tentunya peran negara di sini di mana?, gitu lho. Ketika 5 juta pemegang polis yang sampai saat ini mereka menunggu nasibnya tidak ada ketegasan dari peran negara. Ketika DPR RI berbicara untuk mendesak, semua baru beramai-ramai mendesaknya. Jadi saya berharap memang kasus Jiwasraya ini jadi pelajaran kita semua dan kami terima kasih dengan asosiasi emiten yang memberikan penajaman secara penegasan bahwa inilah yang terjadi. Kita tahu semua ini permainan-permainan ini memang bukan negara, tapi negara harus melindungi setiap warga negaranya. Artinya peraturan-peraturan yang sudah diperlakukan harus dijalankan dengan baik sebagai di sini perannya adalah Otoritas Jasa Keuangan.

KETUA RAPAT:

Cukup Bu, silakan Pak Dolfie.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Terima Kasih Pimpinan.

Tadi dari penjelasan ya dikatakan bahwa Jiwasraya menempatkan investasinya pada saham-saham perusahaan publik. Nah yang saya ingin tahu ini sekarang, apa peran asosiasi terhadap perusahaan-perusahaan publik yang tanda kutip ikut masuk dalam kasus Jiwasraya ini? Kan ini wadah terhadap perusahaan-perusahaan itu. Apa.. Apakah tidak ada *count of conduct* atau apa? Jadi ini kumpul-kumpul apa Pak? Kumpul-kumpul minum kopi atau minum *wine* gitu. Jadi nggak ada perannya sama sekali.

F-PG (M. SARMUJI, SE., M.Si.):

Saya tambahan sedikit.

Saya dengar Jiwasraya ini membeli bukan di bukan saja di pasar-pasar konvensional ya di pasar model konvensional, tapi pasar negosiasi. Nah saya minta dijelaskan deh kalau memang betul Jiwasraya membeli pasar negosiasi itu, minta tanggapannya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, silakan.

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Terimakasih Pak Ketua.

Mungkin saya lanjutkan saja menjawab mungkin satu-persatu dari apa yang ditanyakan Pak. Jadi beberapa pertanyaan mencakup keseluruhan terkait dengan Asabri dan Jiwasraya. Dan menurut kami dari asosiasi emiten tentunya pertama faktanya bahwa Jiwasraya bukan lah *public company*. Kemudian Bumiputera juga bukan *public company*, mereka bukan *member* dari Asosiasi Emiten Indonesia. Kemudian mereka berinvestasi di *public company*. *Public company* bisa bangkrut nggak? Bisa. *Public company* bisa tidak menghasilkan laba kan? Bisa. Saya bisa sebutkan 5 perusahaan besar di dunia saat ini yang sudah bangkrut yang mungkin orang ngebayangin nggak bisa bangkrut. Misalnya kalau Jiwasraya investasi di Nokia salah nggak? Perusahaan itu sudah bangkrut sekarang Pak. Kalau Jiwasraya berinvestasi di Sony Ericson salah nggak? Perusahaan itu juga sudah bangkrut dan investasinya juga salah. Jadi *public company* di mana Jiwasraya berinvestasi tentunya itu adalah masalah Jiwasraya sendiri pak di dalamnya. Artinya yang perlu ditanyakan adalah Jiwasraya. Mengapa mereka berinvestasi di sana dan ada aturan main di OJK bahwa untuk saham bolehnya segini persen, untuk obligasi bolehnya sekian persen, untuk deposito bolehnya sekian persen. Dan saya kira nggak semuanya di *equity*, apa yang diinvestasikan oleh mereka. Itu satu fakta ya Pak ya fakta. Dan ini perlu disampaikan oleh kepada Bapak-Bapak di sini agar jelas ini masalahnya.

Jadi jangan sampai ini saya nggak tahu apakah saham yang digoreng ataukah isu ini jadi yang digoreng. Besar sekali jadinya Pak. Jadi ini kenyataannya demikian. Artinya faktanya bahwa Jiwasraya adalah sebuah perusahaan asuransi yang mengambil uang dari masyarakat dan berinvestasi. Investasinya dalam rangka apa? Dalam rangka menghasilkan *return* yang besar. Nah pilihannya apabisa saham, ini kalau Pak Erizal mengatakan Pak Jon tadi menyatakan ikan busuk sama ikan tidak busuk, tapi saya nggak mau mengatakan ikan busuk. Saya mau mengatakan bahwa ikan kecil atau ikan besar. Karena nggak ada orang yang akan pilih ikan busuk Pak. Orang akan pilihnya ikan kecil, kalau ikan kecil saya dapetnya bisa besar. Kalau ikan besar saya dapetnya bisa kecil. Pilihannya itu. Nah Jiwasraya pilihannya ikan kecil mungkin beberapa ikan kecil, tapi dia ada juga masuk di saham-saham yang saya nggak tahu, artinya datanya saya nggak punya. Tapi dia juga masuk ke saham-saham yang dalam kategori ikan besar. Ya dan itu kami dari asosiasi emiten tidak tahu komposisi dari portofolio dari Jiwasraya sendiri.

Jadi boleh kami tambahkan di sini bahwa kita perlu letakkan ini dalam proporsi yang jelas, terkait Jiwasraya dan yang lain-lain. Kita nggak berharap juag isu ini menjadi terlalu dalam dan terlalu besar sehingga sebaiknya Bapak-Bapak mungkin bertanya kepada Jiwasrayanya sendiri atau perusahaan-perusahaan asuransi yang dicurigai atau dikategorikan dalam katakanlah salah dalam berinvestasi.

Kemudian Pak Jon Erizal mengatakan mengapa Bu Sri mentargetkan 1.000 emiten? Karena apa? Karena kontribusi emiten terhadap perekonomian nasional seperti yang ditanyakan Bu Indah tadi adalah benar bahwa emiten akan menjadi pilar ekonomi Indonesia. Kalau tambah bertambah banyak jumlah emiten, maka tentunya Menteri Keuangan berkepentingan dalam hal ini untuk menambah jumlah pajak yang dibayarkan, perusahaan yang terbuka

dalam artian ya bisa dilihat setiap saat kondisinya bagaimana. Jadi ada kepentingan dari Kementerian Keuangan.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Interupsi Pimpinan. Interupsi boleh?

KETUA RAPAT:

Iya, boleh Bu.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Masih terkait dengan Jiwasraya nih Pak Dito. Saya tidak sepakat dengan tadi Bapak sampaikan bahwa ini letakkan proporsional jangan terlalu dibesar-besarkan. *Concern* DPR itu ada 5,2 juta nasabah yang kategorinya itu masyarakat menengah ke bawah. Jadi 5,2 juta nasabah Jiwasraya itu 5,2nya ..(rekaman terputus) ..

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

.. Jiwasraya bukanlah emiten, itu satu.

yang kedua, kalau dia berinvestasi di perusahaan publik, maka ada beberapa perusahaan publik yang mungkin juga tidak salah juga dia berinvestasi. Itu kan dari asosiasi emiten tidak mengetahui faktanya sebab komposisi portofolio Jiwasrayanya. Jadi kami mungkin tidak bisa menjawab lebih lanjut terkait hal tersebut Bu.

KETUA AEI (FRANSISCUS WELIRANG):

Mohon maaf Bu, mungkin salah bicara Beliau. Jadi gini, bukannya dibesar-besarkan itu tidak boleh diangkat karena kami mempunyai limitasi info itu. jadi bukan itu.

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Ya artinya dari sisi data dan informasinya kami nggak punya bu. Kami yang punya faktanya bahwa Jiwasraya bukan perusahaan publik dan kami tidak punya datanya terkait Jiwasraya gitu lho.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Pimpinan, Pimpinan interupsi Pimpinan.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Interupsi sebentar Pimpinan. Jadi maksud..

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Biar jelas posisinya nih Pimpinan.

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Nggak maksud saya.. maaf Pak Dolfie.

Maksud saya tadi saya mengoreksi kata-kata bahwa jangan dibesarkan seolah-olah kita membesarkan begitu ya, itu. Tapi kalau masalah pasar modal, Jiwasraya bukan itu, kita paham. Jiwasraya itu bukan perusahaan itu. Yang kita masalahkan adalah data tentang (..) juga bahwa jiwasraya menempatkan investasinya itu kepada saham-saham yang masuk LQ 45 itu kan hanya 2%. Selebihnya dia masuk saham-saham yang yang Bapak katakan tadi kecil kan begitu ya kan, ikan-ikan kecil begitu. Artinya di sini seperti yang Pak Dolfie pertanyakan tadi, sejauh mana peran asosiasi terhadap tadi itu ketika saham-saham itu kemudian diinikan oleh Jiwasraya yang kecil-kecil yang tidak masuk LQ 45 kemudian masuk di Reksadana juga yang hanya 5% yang masuk yang dikelola oleh top manajer investasi, itu sejauh mana begitu? Itu kan di bawah pembinaan tadi ya, kan bukan makanya tapi pembinaan dari Bapak-Bapak pasar modal dan tadi saham-saham tadi maksudnya di situ.

Kalau yang masalah gorengan tadi itu mengoreksi karena kita memang *concern* di situ terkait dengan nasabah. Jadi bukan terkait dengan pasar modal ini ya, terimakasih.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Dolfie, silakan.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan, Hendrawan Supratikno.

F-PDIP (DOLFIE O.F.P):

Terimakasih Pimpinan.

Tadi dikatakan bahwa Jiwasraya bukan emiten, kita paham Pak, tapi saham-saham yang dimiliki itu kan saham-saham emiten. Nah bagaimana sikap asosiasi maksud kami itu. Kalau dikatakan tidak tidak apa tidak punya sikap atau tidak melakukan apa-apa, makanya saya tanya asosiasi jadinya tempat apa? Tempat minum kopi atau kongkow-kongkow? Itulah maksud saya itu. Maksud saya itu tadi.

F-PDIP (Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Pimpinan, sebelum kalau berdebat soal Jiwasraya ini atau berdiskusi ini bisa sampai pukul 22.30. Ini Pak Ketua betul-betul mampu memancing ya

suasana menjadi agak panas tapi sebenarnya kita bisa mendiskusikan ini pada saat panja nanti. Itu sebabnya sesuai dengan usulan semula karena ini sudah pukul 17.15, jadi mungkin tidak usah diperpanjang. Nanti kita pada saatnya juga akan membahas ini secara lebih detail.

Terimakasih.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup saya kira ya atau mau ditambahkan?

F-PKS (Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.):

Tapi penjelasan Pak Bobby boleh deh.

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Ya saya tambahkan sedikit-sedikit ya.

KETUA RAPAT:

Ya pak Bobby, silakan.

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Jadi terimakasih Pak, jadi benar kami dari Pimpinan asosiasi emiten memang juga kaget-kaget Pak dengan situasi ini, tapi memang posisi kami, kami menunggu hasil final dulu. Karena ini semua belum jelas Pak, belum final. Karena saya yakin Ibu, kalau kita lihat kok cuma 2% di LQ 45 sedangkan sedemikian besar yang di saham itu. Menurut saya nggak Bu. Yang di LQ 45 atau *bluechip* ini udah jual beli, udah laku dia itulah dia bisa hidup. Yang ini macet Pak. Jadi begitu *invest* nggak bisa keluar, nggak likuid. Nah ini yang dia kejebak. Sehingga kalau diliat nanti diaudit saya yakin pada saat ini ternyata 1 tahun itu transaksi banyak, tapi yang *bluechip* itu udah keluar masuk, keluar masuk aman, untung, gitu. Nah yang ini nggak ribut. Tapi jadi kalau ditanya mungkin nanti ujungnya ke sana, tapi yang ini nyangkut Pak, dia beli 5 ribu sekarang tinggal 50 perak, ini dia nggak bisa keluar.

Jadi kalau Bapak tadi saya lupa yang nanya siapa, kenapa di pasar negosiasi, iya Pak, nggak likuid. Mau cari di pasar, Bapak taruh nggak ada yang jual. Ya Pak Sarmuji. Jadi adanya pasar negosiasi. Pak saya mau jual ga 50, belilah 45, itu pasar negosiasi. Kodenya apa? NR ya? NG. Jadi nanti Bapak di belakang di luar bursa itu Pak di ini bukan di *trading* harian itu. Dan itu yang bisa terjadi lah. Ya Pak Misbakhun lebih tahu itu. Jadi itu ya yang itu bisa terjadi negosiasi tanpa ada ini *market*. Jadi kan kalau kita beli banyak kan naik itu harganya yang biasa, pasar negosiasi tidak Pak. Saya beli harga segini, deal tapi ya jadi balik lagi kembali lagi tadi pertanyaannya ya ini nanti mungkin kita tutup dulu Pak, kalau kita ngobrol-ngobrol kapan-kapan saya diskusi minum kopi boleh, tapi dari kami Pak pasti kami akan ambil posisi untuk emiten-emiten yang merusak nama Pak. Kami selaku wadah pasti malu juga Pak karena investor kami dari asing-asing juga nanya, tapi kalau ditanya sekarang hati-hati juga ini. (suara tidak jelas). Pak Ketua sampai (suara tidak jelas).

KETUA AEI (FRANSISCUS WELIRANG):

Tapi kalau itu itu kan emitennya ikut bermain. Emitennya adalah usaha, urusan jual beli saham itu urusan lain gitu loh. Emiten tidak ada mencampuri jual beli saham. Dia urusannya bisnis dia. Jadi yang di yang menjual beli saham itu ya *market maker*, APEI yang sebagai ininya *nothing to do* dengan emiten gitu lho.

WAKIL KETUA AEI (BOBBY):

Pak, *sorry* Pak, kecuali kalau emitennya juga yang punya.

KETUA AEI (FRANSISCUS WELIRANG):

Kecuali emitennya ikut bermain. Nah itu terus saya mengatakan tadi *insider trade* nah itu yang tidak ada.

KETUA RAPAT:

Oke baik, baik. Cukup ya dari AEI? Emiten cukup dari asosiasi APEI silakan APEI.

KKU APEI (OCTAVIANUS BUDIYANTO/OKI):

Nggak berani Pak, galak Pak.

Saya mewakili temen-temen juga nggak tahu ini sudah deg-degan aja apakah ini jadi terdakwa, tersangka aja ini.

Jadi begini,

Bapak-Bapak yang terhormat Bapak Pimpinan juga.

Jadi yang tadi Bapak bilang bahwa berapa melakukan salah *mis* manajemen investasi dan lain-lain itu mereka punya wadah sendiri Pak, Asosiasi Manajemen Investasi. Jadi kami ini hanya perusahaan efek Pak sebagai *broker*, *broker* untuk jual beli saham perdagangan perantara efek. MI ada sendiri Pak. Itu yang saya nggak tahu. Bapak mungkin manggilnya di belakangan, biasanya yang jagoannya kan belakangan munculnya Pak. Nah gitu. Ya itu mereka sudah ada wadah sendiri Pak. Jadi itu sendiri, itu yang pertama.

Terus yang kedua, ini memang jadi isu yang *hot* Pak tentang Jiwasraya dan lain-lain-lain, saya mungkin nggak sebutkan tapi ini tiap hari jadi *headline* Pak di koran-koran yang membuat investor kami juga sangat ketakutan. Padahal di awal tahun kita punya rasa optimisme yang karena berdasarkan survey Bloomberg, Indonesia itu merupakan investasi yang paling menjanjikan salah satu di dunia, *the emerging market* Pak, *emerging market*. Jadi itu yang sebetulnya kita mau jual, kita sudah mau lari, udah mau ganti gigi ternyata *headline* di koran tiap hari, tidak bisa tidak nggak dari itu. Nasabah balik lagi Pak. Mereka bilang ya udah selesaikan dulu, nanti baru kita masuk ke *market*. Ini yang menjadi *concern* kita. Jadi saya harapkan juga nanti Bapak-Bapak juga bisa membantu kami juga. Bagaimana bisa membuat *market* menjadi kondusif.

Saya nggak pakai istilah tadi kita nggak mau besarkan atau mengecilkan, nggak. Kita ya udah kita bereskan cuman yang tadi kan kita bilang bahwa ini ada beberapa hal yang memang *over* kita lihat *over regulated* Pak. Aturannya sudah banyak Pak yang tadi pak Bobby sudah katakan juga. Aturan kita kurang-kurang apa Pak? Kita juga di perusahaan efek sendiri juga sudah sampai nggak tahu juga ini diatur, ini diatur, ini diatur. Cuman dalam pelaksanaannya kan kita lihat banyak kejadian-kejadian. Berarti ada di sisi supervisi pak yang mungkin itu agak-agak, mungkin agak-agak kelewat di situ. Jadi itu yang mungkin menjadi kita menjadi catatan kita.

Nah 1 hal tadi saya lupa dari Bapak atau Ibu siapa mengatakan bahwa investasi di pasar modal itu menjanjikan seperti apa? Bapak, Ibu di pasar modal itu tidak ada yang *fix*. Karena ini investasi, jadi selalu ada resiko. Di situ yang selalu kita tekankan. Nah bagaimana dengan kejadian-kejadian yang merugikan di pasar modal? Yang pertama saat ini kami punya yang namanya perlindungan investor Pak, tadi sempat ditanyakan oleh Pak Dolfie kalau nggak salah ya. Berapa penjaminan sekarang? Itu 100 juta Pak. Jadi kita bayar juga iuran untuk itu Pak. Untuk itu kita bayar iuran dan itu selama ini ditanggung 100 juta pada investor. Nah sebetulnya kami juga lagi berdiskusi dengan regulator dalam hal ini OJK, kami apa kita melakukan inisiatif yang namanya *disclosurement fund* Pak. Jadi *disclosurement fund* ini adalah *fund* yang nanti akan menggantikan apabila investor dirugikan akibat tindakan pidana dari emiten Pak atau pelaku pasar modal.

Nah ini di negara Amerika juga sudah berlaku Pak, *disclosurement fund* ini. Jadi nanti kalau tadi dibilang ada pelanggaran konsumen bayar sekian milyar ya kecil dibandingkan dengan ini. Nah nanti nggak bisa lagi Pak, itu kerugiannya semua dihitung dan *disclosurement fund* ini yang akan mengganti dan orangnya kena pidana, gitu. Ini inisiator yang sudah kita sudah diskusi Pak dengan regulator karena kita pikir itu harus jalan Pak dalam rangka perlindungan investor ke depannya.

Nah mungkin itu tadi yang jadi catatan saya. Jadi sekali lagi kami tegaskan manajer investasi punya asosiasi sendiri Pak, nggak di kami. Jadi kami hanya sebagai pedagang perantara efek. Transaksinya mungkin di kami ya dan tadi itu asosiasi yang berbeda. Mungkin temen-temen ada yang bisa ditambahkan. Silakan Bu Lili.

KETUA RAPAT:

Baik, mungkin cukup mungkin.

KKU APEI (OCTAVIANUS BUDIYANTO/OKI):

Baik Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau cukup, karena waktu mungkin kita langsung masuk kesimpulan saja. Silakan Sekretariat. Tidak ada ya? Nggak perlu kan? Nggak perlu pakai kesimpulan ya, nggak usah ya.

Baik saya kira, kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Asosiasi Emiten

Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Efek dan seluruh jajarannya yang telah hadir pada Rapat Dengar Pendapat hari ini dan tentunya masukan yang luar biasa. Tentunya ada beberapa pertanyaan mungkin bisa disusulkan dengan secara tertulis.

Mungkin ini kesempatan kita bisa bertemu lagi suatu saat, apabila kita memerlukan informasi lebih lanjut dari Bapak-Bapak sekalian.

Pada Pimpinan dan Anggota Komisi XI, kami ucapkan terima kasih. Dengan demikian kita tutup *closing statement* silakan dari Pak Franky kalau ada, silakan *closing statement*.

KETUA AEI (FRANSISCUS WELIRANG):

Terimakasih.

Saya kira kita memiliki penuh tantangan ke depan dan namun bagi kami yang terpenting adalah konsistensi dengan pelaksanaan.. ada regulasi dilaksanakan dan dikontrol dan itu secara konsisten bagi kami itu adalah sesuatu yang sangat penting saya kira.

Dan kedua tentunya kami sangat mengharapkan bahwa Omnibus law itu sangat penting untuk investor dan untuk bisnis pertumbuhan bisnis daripada anggota kami.

Saya kira demikian Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terimakasih.

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Emiten Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, kita tutup akhiri pada sore hari ini dengan mengucapkan *hamdallah, Alhamdulillahirabbil alamin*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.25 WIB)

Jakarta, Januari 2020
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001